



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2012 (AUDITED)



**BAGIAN ANGGARAN (022)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

BAGIAN ANGGARAN 022



LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2012 (AUDITED)

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Perhubungan adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Perhubungan. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2013

MENTERI PERHUBUNGAN

E.E. MANGINDAAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3451657
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan (*Audited*) yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2013

MENTERI PERHUBUNGAN



E.E. MANGINDAAN

	Hal
Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
A.1. Dasar Hukum	6
A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Perhubungan	7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	23
A.4. Kebijakan Akuntansi	24
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	31
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	31
B.2. Belanja Negara	32
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	46
C.1. Aset Lancar	46
C.2. Aset Tetap	60
C.3. Piutang Jangka Panjang	66
C.4. Aset Lainnya	68
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	70
C.6. Ekuitas Dana Lancar	73
C.7. Ekuitas Dana Investasi	75
D. Pengungkapan Penting Lainnya	75
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	75
D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	76
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua	76
D.4. Rekening Pemerintah	76
D.5. Catatan Penting Lainnya	77
D.6. Pengungkapan Lain-lain	
Laporan-laporan Pendukung	
LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
Neraca Percobaan	
Laporan Barang Pengguna Tahunan	
Laporan Keuangan dan Neraca Badan Layanan Umum	
Laporan Rekening Pemerintah	
Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK	
Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua	

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011	1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2011	2
Tabel 3 : Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA	24
Tabel 4 : Penggolongan Kualitas Piutang	30
Tabel 5 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	31
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2012 dan 2011	32
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2012	32
Tabel 8 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012	33
Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 dan 2011	34
Tabel 10 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011	35
Tabel 11 : Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011	37
Tabel 12 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011	38
Tabel 13 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I	46
Tabel 14 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	46
Tabel 15 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I	47
Tabel 16 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	47
Tabel 17 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	48
Tabel 18 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I	49
Tabel 19 : Besarnya Saldo Kas pada masing-masing BLU	49
Tabel 20 : Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I	50
Tabel 21 : Piutang Bukan Pajak per Eselon I	51
Tabel 22 : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak per Eselon I	52
Tabel 23 : Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>) per Eselon I	53
Tabel 24 : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BL TP/TGR per Eselon I	56
Tabel 25 : Bagian Lancar TP/TGR (<i>Netto</i>) per Eselon I	56
Tabel 26 : Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker BLU	56
Tabel 27 : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan Operasional BLU	57
Tabel 28 : Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (<i>Netto</i>)	58
Tabel 29 : Rincian Persediaan per Eselon I	59
Tabel 30 : Rincian Persediaan masing-masing satker Badan Layanan Umum	60
Tabel 31 : Daftar Persediaan per 31 Desember 2012	60
Tabel 32 : Posisi Aset Tetap	61
Tabel 33 : Posisi Aset Tetap Badan Layanan Umum	61
Tabel 34 : Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2012	61
Tabel 35 : Rincian Mutasi Tanah	62
Tabel 36 : Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	63
Tabel 37 : Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	63
Tabel 38 : Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	64
Tabel 39 : Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	65
Tabel 40 : Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	66
Tabel 41 : Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Eselon I	67

Tabel 42	:	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR per Eselon I	67
Tabel 43	:	Tagihan Tuntutan TP/TGR per Eselon I	68
Tabel 44	:	Rincian Aset Lainnya	68
Tabel 45	:	Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I	69
Tabel 46	:	Rincian Aset Tak Berwujud Menurut Jenisnya	69

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2012 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.331.979.615.033,- atau mencapai 195 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp 683.052.851.436,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp 30.083.615.007.934,- atau mencapai 88,69 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 33.918.359.368.997,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011

Uraian	TA 2012			TA 2011
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	683.052.851.436	1.331.979.615.033	195%	1.442.751.670.667
Belanja Negara	33.918.359.368.997	30.083.615.007.934	88,69%	20.110.043.233.814

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2012 dan 2011.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp 163.463.782.161.579,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 767.731.313.306,-, Aset Tetap sebesar Rp 158.623.798.919.876,-, Piutang Jangka Panjang Rp 477.347.365,-, dan Aset Lainnya sebesar Rp 4.071.774.581.032,-.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 143.073.581.962,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 163.320.708.579.617,-, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 624.657.731.344,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 162.696.050.848.273,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/ (penurunan)	
	31 Des 2012 (Rp)	31 Des 2011 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	767.731.313.306	1.083.421.312.189	(315.689.998.883)	(29,14)
Aset Tetap	158.623.798.919.876	135.489.192.929.555	23.134.605.990.321	17,07
Piutang Jangka Panjang	477.347.365	421.823.066	55.524.299	13,16
Aset Lainnya	4.071.774.581.032	2.687.295.869.475	1.384.478.711.557	51,52
Jumlah Aset	163.463.782.161.579.	139.260.331.934.285	24.203.450.227.294	17,38
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	143.073.581.962	161.634.624.499	(18.561.042.537)	(11,48)
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	624.657.731.344	921.786.687.690	(297.128.956.346)	(32,23)
Ekuitas Dana Investasi	162.696.050.848.273	138.176.910.622.096	24.519.140.226.177	17,74
Jumlah Ekuitas Dana	163.320.708.579.617	139.098.697.309.786	24.222.011.269.831	17,41
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	163.463.782.161.579	139.260.331.934.285	24.203.450.227.294	17,38

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Kode Lap. : LRAKT
Tanggal : 15 Mei 2013
Halaman : 1
Prog.id : lu_pauait

No	URAIAN	2012				2011			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	683,052,851,436	1,331,979,615,033	648,926,763,597	195.00	370,383,536,750	1,442,751,670,667	1,072,368,133,917	389.53
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	683,052,851,436	1,331,979,615,033	648,926,763,597	195.00	370,383,536,750	1,442,751,670,667	1,072,368,133,917	389.53
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	683,052,851,436	1,331,979,615,033	648,926,763,597	195.00	370,383,536,750	1,442,751,670,667	1,072,368,133,917	389.53
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1	PENERIMAAN NEGARA NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.a	Penerimaan Perpajakan Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.2	HIBAH NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)	683,052,851,436	1,331,979,615,033	648,926,763,597	195.00	370,383,536,750	1,442,751,670,667	1,072,368,133,917	389.53
B	BELANJA NEGARA								
B.I	BELANJA TRANSAKSI KAS	33,918,359,368,997	30,005,874,401,184	(3,912,484,967,813)	88.46	23,340,702,622,000	20,110,043,233,814	(3,230,659,388,186)	86.16
B.I.1	Rupiah Murni	31,458,489,291,997	28,585,174,810,274	(2,873,314,481,723)	90.87	21,626,158,865,000	19,442,717,151,571	(2,183,441,713,429)	89.90
B.I.1.a	Belanja Pegawai	1,500,030,891,156	1,441,874,025,790	(58,156,865,366)	96.12	1,378,885,219,000	1,326,418,456,631	(52,466,762,369)	96.19
B.I.1.b	Belanja Barang	6,249,986,815,426	5,363,017,252,980	(886,969,562,446)	85.81	4,162,892,362,000	3,516,506,945,874	(646,385,416,126)	84.47
B.I.1.c	Belanja Modal	23,708,471,585,415	21,780,283,531,504	(1,928,188,053,911)	91.87	16,084,381,284,000	14,599,791,749,066	(1,484,589,534,934)	90.77
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	2,459,870,077,000	1,420,699,590,910	(1,039,170,486,090)	57.76	1,714,543,757,000	667,326,082,243	(1,047,217,674,757)	38.92
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.b	Belanja Barang	4,512,100,000	2,855,543,000	(1,656,557,000)	63.29	8,534,349,000	2,714,986,310	(5,819,362,690)	31.81
B.I.2.c	Belanja Modal	2,455,357,977,000	1,417,844,047,910	(1,037,513,929,090)	57.74	1,706,009,408,000	664,611,095,933	(1,041,398,312,067)	38.96
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II	BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	77,740,606,750	77,740,606,750	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Kode Lap. : LRAKT
Tanggal : 13 Mei 2013
Halaman : 2
Prog.Id : lu_pauait

No	URAIAN	2012				2011			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.II	BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	77,740,606,750	77,740,606,750	0.00	0	0	0	0.00
B.II.1	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.2	Belanja Barang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.3	Belanja Modal Non Kas	0	77,740,606,750	77,740,606,750	0.00	0	0	0	0.00
B.II.4	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.5	Subsidi Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.6	Hibah Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.7	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.8	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)	33,918,359,368,997	30,083,615,007,934	(3,834,744,361,063)	88.69	23,340,702,622,000	20,110,043,233,814	(3,230,659,388,186)	86.16
C	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Jakarta, Mei 2013

MENTERI PERHUBUNGAN



E.E. MANGINDAAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

Uraian	Catatan	TA 2012			TA 2011
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak		683.052.851.436	1.331.979.615.033	195	1.442.751.670.667
Jumlah Pendapatan		683.052.851.436	1.331.979.615.033	195	1.442.751.670.667
BELANJA	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	1.500.030.891.156	1.441.874.025.790	96,12	1.326.418.456.631
2. Belanja Barang	B.2.2	6.254.498.915.426	5.365.872.795.980	85,79	3.519.221.932.184
3. Belanja Modal	B.2.3	26.163.829.562.415	23.198.127.579.414	88,66	15.264.402.844.999
4. Belanja Modal Non Kas	B.2.4.	0	77.740.606.750	0	0
Jumlah Belanja		33.918.359.368.997	30.083.615.007.934	88,69	20.110.043.233.814

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2011
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	Rp 810.754.169	Rp 473.989.973
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	Rp 19.029.872.722	Rp 10.024.539.870
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	Rp 3.329.183.847	Rp 1.873.343.972
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.4	Rp 161.040.871.577	Rp 132.850.346.828
Jumlah Kas dan Bank		Rp 184.210.682.315	Rp 145.222.220.643
Belanja Dibayar Dimuka	C.1.5	Rp 160.596.995	Rp 511.735.738
Uang Muka Belanja	C.1.6	Rp 19.835.100.558	Rp 0
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.7	Rp 146.322.771.124	Rp 187.044.736.967
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.8	Rp (28.407.901.233)	Rp (253.331.744)
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	C.1.9	Rp 117.914.869.891	Rp 186.791.405.223
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.1.10	Rp 287.903.313.703	Rp 46.170.400
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TGR	C.1.11	Rp (215.000)	Rp (230.852)
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	C.1.12	Rp 287.903.098.703	Rp 45.939.548
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.13	Rp 1.617.931.020	Rp 409.502.500
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.14	Rp (47.951.843)	Rp (41.909.700)
<i>Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Netto)</i>	C.1.15	Rp 1.569.979.177	Rp 367.592.800
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.1.16	Rp 42.357.400	Rp 62.895.200
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.1.17	Rp (211.787)	Rp (314.476)
<i>Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (Netto)</i>	C.1.18	Rp 42.145.613	Rp 62.580.724
Jumlah Piutang (Bersih)		Rp 407.430.093.384	Rp 187.267.518.295
Persediaan	C.1.19	Rp 154.789.258.848	Rp 749.249.628.830
Persediaan Badan Layanan Umum	C.1.20	Rp 1.305.581.206	Rp 1.170.208.683
Jumlah Aset Lancar		Rp 767.731.313.306	Rp 1.083.421.312.189
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	Rp 50.201.701.857.731	Rp 49.298.586.833.502
Tanah Badan Layanan Umum		Rp 1.250.491.053.251	Rp 1.223.489.280.480
Peralatan dan Mesin	C.2.2	Rp 16.889.268.343.786	Rp 13.345.181.983.197
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum		Rp 750.047.580.208	Rp 643.140.909.230
Gedung dan Bangunan	C.2.3	Rp 7.819.752.237.038	Rp 5.578.033.760.765
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum		Rp 1.325.147.647.960	Rp 1.199.196.156.350
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	Rp 52.728.985.432.198	Rp 47.945.880.057.181
Jalan Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum		Rp 42.434.655.576	Rp 38.866.982.003
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	Rp 2.433.243.142.358	Rp 2.291.839.981.600
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum		Rp 13.053.107.171	Rp 11.326.948.158
KDP	C.2.6	Rp 25.113.457.585.229	Rp 13.861.192.285.655
KDP Badan Layanan Umum		Rp 56.216.277.370	Rp 52.457.751.434
Jumlah Aset Tetap		Rp 158.623.798.919.876	Rp 135.489.192.929.555
Piutang Jangka Panjang	C.3		
Tagihan TP/TGR	C.3.1	Rp 479.001.363	Rp 423.135.811
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.3.2	Rp (1.653.998)	Rp (1.312.745)
Jumlah Tagihan TP/TGR (Netto)		Rp 477.347.365	Rp 421.823.066

Aset Lainnya	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	Rp 1.886.541.933.297	Rp 1.465.590.727.842
Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum		Rp 42.026.303.393	Rp 24.093.295.916
Aset Lain-Lain	C.4.2	Rp 2.142.196.518.442	Rp 1.197.499.645.717
Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum		Rp 1.009.825.900	Rp 112.200.000
Jumlah Aset Lainnya		Rp 4.071.774.581.032	Rp 2.687.295.869.475
JUMLAH ASET		Rp 163.463.782.161.579	Rp 139.260.331.934.285
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	Rp 103.357.423.491	Rp 131.518.928.284
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.5.2	Rp 0	Rp 116.103.388
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3	Rp 19.802.839.526	Rp 19.480.696.134
Uang Muka dari KPPN	C.5.4	Rp 810.754.169	Rp 473.989.973
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.5.5	Rp 19.102.564.776	Rp 10.044.906.720
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 143.073.581.962	Rp 161.634.624.499
JUMLAH KEWAJIBAN		Rp 143.073.581.962	Rp 161.634.624.499
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Cadangan Piutang	C.6.1	Rp 407.430.093.384	Rp 187.267.518.295
Cadangan Persediaan	C.6.2	Rp 156.094.840.054	Rp 750.419.837.513
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.6.3	Rp (103.181.868.640)	Rp (131.633.900.472)
Dana Lancar Badan Layanan Umum	C.6.4	Rp 161.040.871.577	Rp 132.850.346.828
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	C.6.5	Rp 3.080.936.942	Rp 1.851.845.922
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.6.6	Rp 19.995.697.553	Rp 511.735.738
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.6.7	Rp (19.802.839.526)	Rp (19.480.696.134)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		Rp 624.657.731.344	Rp 921.786.687.690
Ekuitas Dana Investasi	C.7		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.7.1	Rp 158.623.798.919.876	Rp 135.489.192.929.555
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.7.2	Rp 4.072.251.928.397	Rp 2.687.717.692.541
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		Rp 162.696.050.848.273	Rp 138.176.910.622.096
JUMLAH EKUITAS DANA		Rp 163.320.708.579.617	Rp 139.098.697.309.786
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		Rp 163.463.782.161.579	Rp 139.260.331.934.285

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIKLT
Tanggal : 24/05/13
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2012	2011	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	810,754,169	473,989,973	336,764,196	71.04
Kas di Bendahara Penerimaan	19,029,872,722	10,024,539,870	9,005,332,852	89.83
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,329,183,847	1,873,343,972	1,455,839,875	77.71
Kas pada Badan Layanan Umum	161,040,871,577	132,850,346,828	28,190,524,749	21.21
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	160,596,995	511,735,738	(351,138,743)	(68.61)
Uang muka belanja (prepayment)	19,835,100,558	0	19,835,100,558	0.00
Piutang Bukan Pajak	146,322,771,124	187,044,736,967	(40,721,965,843)	(21.77)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	(28,407,901,233)	(253,331,744)	(28,154,569,489)	11,113.71
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	<i>117,914,869,891</i>	<i>186,791,405,223</i>	<i>(68,876,535,332)</i>	<i>(36.87)</i>
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	287,903,313,703	46,170,400	287,857,143,303	**, ***, **
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(215,000)	(230,852)	15,852	(6.86)
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	<i>287,903,098,703</i>	<i>45,939,548</i>	<i>287,857,159,155</i>	<i>**, ***, **</i>
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1,617,931,020	409,502,500	1,208,428,520	295.09
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(47,951,843)	(41,909,700)	(6,042,143)	14.41
<i>Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)</i>	<i>1,569,979,177</i>	<i>367,592,800</i>	<i>1,202,386,377</i>	<i>327.09</i>
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	42,357,400	62,895,200	(20,537,800)	(32.65)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(211,787)	(314,476)	102,689	(32.65)
<i>Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)</i>	<i>42,145,613</i>	<i>62,580,724</i>	<i>(20,435,111)</i>	<i>(32.65)</i>
Persediaan	154,789,258,848	749,249,628,830	(594,460,369,982)	(79.34)
Persediaan Badan Layanan Umum	1,305,581,206	1,170,208,683	135,372,523	11.56
JUMLAH ASET LANCAR	767,731,313,306	1,083,421,312,189	(315,689,998,883)	(29.13)
ASET TETAP				
Tanah	50,201,701,857,731	49,298,586,833,502	903,115,024,229	1.83
Tanah Badan Layanan Umum	1,250,491,053,251	1,223,489,280,480	27,001,772,771	2.20
Peralatan dan Mesin	16,889,268,343,786	13,345,181,983,197	3,544,086,360,589	26.55
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	750,047,580,208	643,140,909,230	106,906,670,978	16.62
Gedung dan Bangunan	7,819,752,237,038	5,578,033,760,765	2,241,718,476,273	40.18
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	1,325,147,647,960	1,199,196,156,350	125,951,491,610	10.50
Jalan, Irigasi dan Jaringan	52,728,985,432,198	47,945,880,057,181	4,783,105,375,017	9.97
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum	42,434,655,576	38,866,982,003	3,567,673,573	9.17

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIKLT
Tanggal : 24/05/13
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2012	2011	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Aset Tetap Lainnya	2,433,243,142,358	2,291,839,981,600	141,403,160,758	6.16
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	13,053,107,171	11,326,948,158	1,726,159,013	15.23
Konstruksi Dalam Pengerjaan	25,113,457,585,229	13,861,192,285,655	11,252,265,299,574	81.17
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	56,216,277,370	52,457,751,434	3,758,525,936	7.16
JUMLAH ASET TETAP	158,623,798,919,876	135,489,192,929,555	23,134,605,990,321	17.07
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	479,001,363	423,135,811	55,865,552	13.20
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1,653,998)	(1,312,745)	(341,253)	25.99
<i>Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	<i>477,347,365</i>	<i>421,823,066</i>	<i>55,524,299</i>	<i>13.16</i>
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	477,347,365	421,823,066	55,524,299	13.16
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,886,541,933,297	1,465,590,727,842	420,951,205,455	28.72
Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum	42,026,303,393	24,093,295,916	17,933,007,477	74.43
Aset Lain-lain	2,142,196,518,442	1,197,499,645,717	944,696,872,725	78.88
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	1,009,825,900	112,200,000	897,625,900	800.02
JUMLAH ASET LAINNYA	4,071,774,581,032	2,687,295,869,475	1,384,478,711,557	51.51
JUMLAH ASET	163,463,782,161,579	139,260,331,934,285	24,203,450,227,294	17.38
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	103,357,423,491	131,518,928,284	(28,161,504,793)	(21.41)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0	116,103,388	(116,103,388)	(100.00)
Pendapatan Diterima Dimuka	19,802,839,526	19,480,696,134	322,143,392	1.65
Uang Muka dari KPPN	810,754,169	473,989,973	336,764,196	71.04
Pendapatan Yang Ditangguhkan	19,102,564,776	10,044,906,720	9,057,658,056	90.17
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	143,073,581,962	161,634,624,499	(18,561,042,537)	(11.48)
JUMLAH KEWAJIBAN	143,073,581,962	161,634,624,499	(18,561,042,537)	(11.48)
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang	407,430,093,384	187,267,518,295	220,162,575,089	117.56
Cadangan Persediaan	156,094,840,054	750,419,837,513	(594,324,997,459)	(79.19)
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(103,181,868,640)	(131,633,900,472)	28,452,031,832	(21.61)
Dana Lancar BLU	161,040,871,577	132,850,346,828	28,190,524,749	21.21
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	3,080,936,942	1,851,845,922	1,229,091,020	66.37
Barang/Jasa yang Harus Diterima	19,995,697,553	511,735,738	19,483,961,815	3,807.42
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	(19,802,839,526)	(19,480,696,134)	(322,143,392)	1.65
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	624,657,731,344	921,786,687,690	(297,128,956,346)	(32.23)

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIKLT
Tanggal : 24/05/13
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2012	2011	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	158,623,798,919,876	135,489,192,929,555	23,134,605,990,321	17.07
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	4,072,251,928,397	2,687,717,692,541	1,384,534,235,856	51.51
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	162,696,050,848,273	138,176,910,622,096	24,519,140,226,177	17.74
JUMLAH EKUITAS DANA	163,320,708,579,617	139,098,697,309,786	24,222,011,269,831	17.41
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	163,463,782,161,579	139,260,331,934,285	24,203,450,227,294	17.38

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara AkruaI pada Laporan Keuangan.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/ 2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/ 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

*Rencana
Strategis*

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2010 -2014

I. VISI

Visi Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 adalah **"Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah."** *Pelayanan perhubungan yang handal*, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Pelayanan perhubungan yang berdaya saing* diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. *Pelayanan perhubungan yang memberikan nilai tambah* diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

II. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi dengan mengacu kepada tiga pendekatan, yaitu: Pertama, pemulihan kondisi sarana dan prasarana perhubungan agar berfungsi seperti pada masa sebelum krisis ekonomi; Kedua, melakukan konsolidasi dengan reorientasi dan reposisi peran dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam kerangka *good governance*; Ketiga, melaksanakan pembangunan dalam rangka *peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan* jasa perhubungan. Oleh karena itu misi Kementerian Perhubungan sesuai dengan tiga pendekatan tersebut adalah:

a. Mempertahankan tingkat pelayanan jasa perhubungan

Sejak terjadi krisis ekonomi yang didahului dengan krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, kinerja pelayanan jasa perhubungan semakin memburuk karena operator tidak mampu melakukan perawatan dan peremajaan armada, pemerintah hampir tidak memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan masyarakat pengguna jasa tidak memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan pemulihan kinerja pelayanan jasa perhubungan menuju kepada kondisi normal, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana perhubungan.

b. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan (*regulatory reform*) dan penegakan hukum secara konsisten

Sesuai dengan prinsip *good governance* dipandang perlu melakukan restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan jasa perhubungan. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, mengarahkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan perbantuan. Reformasi di bidang regulasi (*regulatory reform*) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa perhubungan. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa perhubungan.

c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan perdesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan, perbaikan pelayanan melalui penerapan teknologi transportasi sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa perhubungan senantiasa berpedoman kepada rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

III. TUJUAN

Pembangunan Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 2010-2014 bertujuan untuk mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

Dalam mewujudkan dukungan tersebut penyelenggaraan transportasi harus berjalan secara efektif dan efisien guna menunjang dan mendorong keberhasilan pembangunan nasional. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS

a. SASARAN

Sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan diarahkan kepada upaya penyelenggaraan transportasi guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta adil dan demokratis. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum transportasi difungsikan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di perdesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk memperlancar mobilitas orang dan

distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung perwujudan Indonesia yang aman dan damai, diupayakan penyediaan aksesibilitas transportasi di wilayah konflik, wilayah perbatasan dan wilayah terisolasi untuk mendorong kelancaran mobilitas orang, distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pengembangan wilayah dan pemereratan hubungan antar wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendukung Indonesia yang adil dan demokratis, pembangunan transportasi diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transportasi antar wilayah akan membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah, meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah, sehingga mendorong terciptanya kesempatan melaksanakan pembangunan antar wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperanserta dalam penyelenggaraan transportasi. Dengan memperhatikan arah penyelenggaraan transportasi seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada kurun waktu 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana perhubungan agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan (*regulatory reform*)) dibidang perhubungan dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai;
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b. PRIORITAS

Pembangunan perhubungan tahun 2010-2014, dititikberatkan kepada pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan pembangunan angkutan jalan, angkutan perkotaan, angkutan kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara dengan prioritas sebagai berikut:

1. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global;
2. Terwujudnya keselamatan transportasi sebagai implementasi dari program *Roadmap to Zero Accident*;
3. Mendukung program pengentasan kemiskinan melalui upaya penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;
4. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi terutama untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran: pengurangan *backlog* sarana dan prasarana perkeretaapian dan penambahan kapasitas terkait dengan peningkatan permintaan jasa transportasi;
5. Penyediaan dana pendamping pinjaman dan hibah luar negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pinjaman secara bilateral;
6. Pembangunan di daerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan pemulihan fungsi infrastruktur transportasi;
7. Pembangunan kawasan perbatasan/pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI;
8. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya sehubungan dengan perubahan iklim terkait dengan isu pemanasan global (*global warming*).

c. STRATEGI

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan perhubungan, yaitu:

1. STRATEGI PEMULIHAN DAN PENATAAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Strategi ini diarahkan untuk melakukan pemulihan dan penataan penyelenggaraan perhubungan kembali ke posisi normal setelah terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan dilanjutkan dengan penataan Sistem Transportasi Nasional sejalan dengan perubahan lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional maupun global. Pemulihan dan penataan penyelenggaraan perhubungan dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan dibarengi dengan pelaksanaan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan (*regulatory reform*), peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Perhubungan, dengan pemihakan kepada peranserta swasta dalam pengoperasian dan pembangunan infrastruktur perhubungan, serta mereposisi peran pemerintah dari operator dan pemilik (*owner*) menjadi regulator dan fasilitator.

2. STRATEGI PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN

Strategi Pembangunan Perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat baik di seluruh pelosok tanah air maupun di manca negara. Pembangunan perhubungan dilaksanakan dengan berpedoman kepada 7 (tujuh) pilar sebagai berikut:

- a) Pembangunan perhubungan dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (*cost recovery*), baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang;

- b) Pembangunan perhubungan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hasil pembangunan perhubungan memiliki dayaguna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat;
- c) Pembangunan perhubungan difokuskan kepada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah;
- d) Pembangunan perhubungan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*);
- e) Pembangunan perhubungan dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (*market failure*);
- f) Pembangunan perhubungan dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistis dan rasional;
- g) Pembangunan Perhubungan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan baik pada skala kecil, menengah, maupun skala besar.

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan transportasi, pelaksanaan fungsi penunjang (*servicing function*) dilakukan pada daerah yang telah berkembang dan maju. Kebijakan pelayanan pada daerah yang telah berkembang atau maju antara lain memberikan peluang bagi keterlibatan swasta untuk melaksanakan

pelayanan dengan prinsip *least cost economy* terutama pada segmen usaha yang mampu mencapai *cost recovery*, sedangkan untuk segmen usaha yang tidak mampu mencapai *cost recovery*, pembangunan fasilitas pelayanan dilakukan oleh pemerintah. Untuk daerah terisolasi, terpencil, terbelakang dan kawasan perbatasan, pemerintah memberikan pelayanan transportasi melalui pelaksanaan fungsi pendorong (*promoting function*).

2. Pembangunan Perhubungan mendukung kebijakan otonomi daerah melalui penyediaan jasa perhubungan yang memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan daerah. Disamping itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk melakukan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian fasilitas perhubungan sesuai dengan kewenangannya.
3. Pembangunan perhubungan mendukung kelancaran mobilitas, distribusi dan pembangunan terutama pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sektor-sektor strategis lainnya, yang pada akhirnya turut menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan yang berkesinambungan.
4. Kebijakan pembangunan perhubungan berkelanjutan dilakukan dengan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, hemat energi serta meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan sektor perhubungan dapat dilakukan secara efisien.
5. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dilakukan dengan melibatkan partisipasi swasta dan melakukan restrukturisasi pada bidang usaha sesuai dengan tuntutan pasar domestik dan pasar global serta sesuai dengan semangat perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan reposisi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas SDM.
6. Kebijakan pembangunan perhubungan berkelanjutan dilakukan dengan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, hemat energi serta meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan sektor perhubungan dapat dilakukan secara efisien.
7. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dilakukan dengan melibatkan partisipasi swasta dan melakukan restrukturisasi pada bidang usaha sesuai dengan tuntutan pasar domestik dan pasar global serta sesuai dengan semangat perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan reposisi

kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas SDM.

8. Prinsip dasar kebijakan penetapan tarif jasa perhubungan terdiri dari 3 (tiga) aspek pertimbangan, yaitu:
 - a. Sisi Operator selaku Penyedia Jasa:

Pertimbangan finansial dengan pendekatan kepada faktor kelangsungan usaha dengan memperhitungkan biaya dari setiap jenis jasa perhubungan (*cost of service*) dan nilai jasa yang diproduksi dan penggunaan teknologi (*value of service*).
 - b. Sisi Masyarakat selaku Pengguna Jasa:

Pertimbangan sosial ekonomi dengan pendekatan kepada daya beli masyarakat dengan memperhitungkan kemampuan membayar (*ability to pay*) dan kemauan membayar (*willingness to pay*).
 - c. Sisi Pemerintah selaku Regulator:

Pertimbangan kebijakan nasional dengan lebih menekankan kepada stabilitas nasional, namun tetap dengan memperhitungkan tercapainya keadaan "*optimum allocation resources*" dengan memperhatikan kriteria efisiensi dan kriteria pemerataan dalam pembangunan serta menjaga tingkat pelayanan (*level of service*) dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan jasa perhubungan.

PRIORITAS PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2012

Sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan diarahkan kepada upaya penyelenggaraan transportasi guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta adil dan demokratis. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan transportasi difungsikan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di pedesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk memperlancar mobilitas orang, distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung perwujudan Indonesia yang aman dan damai, diupayakan penyediaan aksesibilitas transportasi di

wilayah konflik, wilayah perbatasan dan wilayah terisolasi untuk mendorong kelancaran mobilitas orang, distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pengembangan wilayah dan pemerataan hubungan antar wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendukung Indonesia yang adil dan demokratis, pembangunan transportasi pada tahun 2012 diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transportasi antar wilayah akan membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah, meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah, sehingga mendorong terciptanya kesempatan melaksanakan pembangunan antar wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperanserta dalam penyelenggaraan transportasi. Dengan memperhatikan arah penyelenggaraan transportasi seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2012 adalah mewujudkan sasaran yang telah diformulasikan dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan 2010-2014 sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana perhubungan agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
2. Terwujudnya keberlanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan/ *regulatory reform*) dibidang perhubungan dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai;
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan tahun 2012, skenario pagu anggaran setiap program pembangunan Kementerian Perhubungan tahun 2012 disusun berdasarkan 8 (delapan) prioritas sebagai berikut :

1. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global;
2. Terwujudnya keselamatan transportasi sebagai implementasi dari program *Roadmap to Zero Accident*;
3. Mendukung program pengentasan kemiskinan melalui upaya penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;
4. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi terutama untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran : pengurangan *backlog* sarana dan prasarana perkeretaapian; dan penambahan kapasitas terkait dengan peningkatan permintaan jasa transportasi;
5. Penyediaan dana pendamping pinjaman dan hibah luar negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pinjaman secara bilateral;
6. Pembangunan di daerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan pemulihan fungsi infrastruktur transportasi;
7. Pembangunan kawasan perbatasan/pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI;
8. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya sehubungan dengan perubahan iklim terkait dengan isu pemanasan global (*global warming*).

Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan sektor transportasi tahun 2012 adalah meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan jasa transportasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Upaya tersebut antara lain meliputi :

1. Meningkatkan keselamatan operasional baik sarana maupun prasarana transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi baik dikawasan perkotaan maupun daerah perbatasan, terisolir dan belum berkembang.
3. Penyediaan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas;
4. Melanjutkan reformasi peraturan perundangan agar dapat mendorong keikutsertaan investasi swasta dan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait;
5. Melakukan restrukturisasi kelembagaan terhadap penyelenggara transportasi baik ditingkat pusat maupun daerah;
6. Melakukan optimalisasi penggunaan dana pemerintah baik untuk operasional, pemeliharaan, rehabilitasi maupun investasi melalui penyusunan prioritas program yang diwujudkan dalam suatu kegiatan.

Arah kebijakan masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut:

a. Transportasi Darat

Arah kebijakan transportasi darat meliputi: (1) Peningkatan kondisi pelayanan angkutan umum jalan raya; (2) Meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai pendukung moda transportasi lainnya; (3) Melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil; (4) Melanjutkan kegiatan operasional unit pelaksana teknis dan tugas serta fungsi pemerintah lainnya; (5) Meningkatkan keselamatan transportasi darat secara komprehensif dan terpadu; (6) Pengembangan transportasi darat berkelanjutan; (7) Pemaduan pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota.

b. Transportasi Kereta Api

Arah kebijakan pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 2012 meliputi: (1) Penyiapan dan penguatan regulasi berupa penyelesaian peraturan perundangan serta penyusunan peraturan/pedoman pendukung lainnya termasuk regulasi dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian multioperator; (2) Melanjutkan reformasi dan restrukturisasi

kelembagaan termasuk untuk mewujudkan eksistensi Pemerintah sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian; (3) Meningkatkan kapasitas lintas dan kualitas pelayanan serta reaktivasi koridor-koridor yang sudah tidak dioperasikan; (4) Meningkatkan keselamatan angkutan melalui pemulihan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian serta pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian; (5) Melaksanakan audit kinerja prasarana dan sarana serta SDM operator perkeretaapian; (6) Meningkatkan peran angkutan perkeretaapian melalui perwujudan keterpaduan antar moda dan pengembangan KA perkotaan; (7) Meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan swasta di bidang perkeretaapian; (8) Meningkatkan SDM perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian nasional.

c. Transportasi Laut

Arah kebijakan pembangunan transportasi laut tahun 2012 difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, pembangunan sistem yang memperlancar dan mempermudah pelayanan serta peningkatan SDM dan pengembangan institusi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17/2008 tentang Pelayaran. Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: (1) Membangun dan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang memiliki *waiting time* tinggi; (2) Membangun kapal-kapal perintis bagi daerah yang membutuhkan; (3) Membangun pelabuhan-pelabuhan kecil yang disinggahi kapal perintis; (4) Membangun dan meningkatkan kualitas terminal penumpang, terutama pada daerah tujuan wisata; (5) Membangun kapal patroli dan SBNP serta peralatan keselamatan lainnya; (6) Membangun sistem pelayanan perizinan yang memperlancar, mempermudah dan memberi kepastian waktu; (7) Membangun sistem pelayanan dan pendidikan terpadu bagi pelaut, bekerja sama dengan Badan Diklat Perhubungan; (8) Membangun sistem pengadaan barang/jasa yang transparan dan bersih; (9) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; (10) Membentuk organisasi baru sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008: Otoritas pelabuhan, Syahbandar, Unit Penyelenggara Pelabuhan dan *Sea and Coast Guard*;

(11) Menerapkan sistem remunerasi baru; (12) Melimpahkan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan *feeder* kepada pemerintah daerah.

d. Transportasi Udara

Arah kebijakan pembangunan transportasi udara adalah: (1) Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO guna meningkatkan keselamatan penerbangan, baik selama penerbangan maupun di bandara wilayah Indonesia; (2) Mengembangkan dan meningkatkan prasarana transportasi udara di daerah rawan bencana alam dan daerah perbatasan serta daerah potensi ekonomi; (3) Peningkatan dan pemulihan kembali fungsi sarana dan prasarana transportasi udara sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh ICAO; (4) Pengembangan sistem, regulasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; (5) Menciptakan perusahaan penerbangan nasional yang efisien, efektif, dan kompetitif dalam pasar internasional; (6) Menciptakan iklim usaha jasa angkutan udara dalam persaingan sehat dan kondusif sehingga mempunyai kelangsungan hidup jangka panjang.

e. Penunjang Transportasi

Pada tahun 2012 arah kebijakan penunjang transportasi di lingkungan Sekretariat Jenderal meliputi: (1) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan penyiapan tugas pokok dan fungsi; (2) Memberikan kesempatan yang luas kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kompetensinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di sektor transportasi; (3) Pengembangan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Perhubungan; (4) Reformasi dan restrukturisasi organisasi yang mampu mengantisipasi perkembangan sektor transportasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi; (5) Perencanaan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi; (6) Koordinasi penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan perundang-undangan di bidang transportasi; (7) Penyusunan peraturan pelaksanaan perundang-undangan di bidang transportasi; (8) Pemberian pertimbangan dalam penerapan peraturan

perundang-undangan dan perumusan perjanjian; (9) Pemberian bantuan hukum; (10) Penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi; (11) Pengelolaan jaringan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi; (12) Penyiapan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta konsultasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri; (13) Mewujudkan Pelayanan Umum yang Optimal yang antara lain meliputi : Terwujudnya pelayanan kepemimpinan dan keprotokolan yang handal dan dinamis; Terwujudnya pelayanan dan tertib administrasi yang sesuai dengan sistem dan prosedur; Terselenggaranya pelayanan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan (K3), sarana dan prasarana dengan baik; Terwujudnya pelayanan administrasi pembiayaan dan perjalanan dinas yang efektif dan efisien; Terselenggaranya peningkatan kesehatan pegawai yang memadai; (14) Mengembangkan kerja sama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran sehingga anggaran dapat terserap sesuai dengan rencana dan sesuai peraturan berlaku; (15) Mengarahkan dan mendorong agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terjadi KKN; (16) Melaksanakan *Action Plan* (rencana tindak) Kementerian Perhubungan untuk mencapai opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (17) Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan *action plan*; (18) Melakukan klarifikasi terhadap hasil inventarisasi BMN oleh Tim Keppres 17; (19) Intensifikasi dan ekstensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Perhubungan; (20) Mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tingkat pelayanan kepada publik tinggi untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU); (21) Penatausahaan, pembukuan, verifikasi dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan Kementerian Perhubungan; (22) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Anggaran yang tertib dan teratur termasuk evaluasi Pinjaman Hibah Luar Negeri; (23) Pengelola Anggaran yang berkualitas; (24) Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan BMN; (25) Melaksanakan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup sektor transportasi;

(26) Perluasan jaringan informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memperluas difusi informasi kebijakan Kementerian Perhubungan melalui media radio, televisi dan media cetak dengan memanfaatkan teknologi internet akan pengembangan komunikasi interaktif lewat internet; (27) Pengembangan dan penyebaran informasi dan komunikasi secara terpadu melalui satu pintu yang mengintegrasikan masukan-masukan dari bagian Humas di setiap Direktorat Jenderal; (28) Pengembangan / peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) secara professional dengan melaksanakan Diklat bidang infokom yang professional dan pemanfaatan program, diklat dalam dan luar negeri bidang informasi; (29) Peningkatan sarana dan prasarana operasional infokom, melalui pengadaan sarana dan prasarana infokom sesuai perkembangan teknologi informasi. Upaya peningkatan sarana dan prasarana tersebut dilakukan pula pengembangan sistem pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan; (30) Penyusunan standard kerja baku sebagai sarana pengendalian dan jaminan atas mutu penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informasi; (31) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan melalui peningkatan kerjasama dalam penyebaran informasi dan peningkatan sarana pelayanan informasi kepada masyarakat; (32) Peningkatan hubungan kerjasama dengan lembaga /unsur pers dan kelompok organisasi masyarakat. Upaya peningkatan ini dilakukan dengan melaksanakan jumpa pers dan liputan pers secara berkala serta peningkatan kualitas pemberitaan lewat media pers. Disamping itu juga perlu dilakukan pemanfaatan / pemberdayaan kelompok atau organisasi masyarakat dalam penyebaran informasi (kelompok informasi masyarakat, *media watch*); (33) Mengintegrasikan sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan; (34) Menstandarisasi data dan mekanisme pertukaran data di lingkungan Kementerian Perhubungan; (35) Menerapkan tata kelola administrasi pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) di lingkungan Kementerian Perhubungan; (36) Melakukan pengembangan aplikasi dengan menyesuaikan kebutuhan pengolahan dan penyajian data dan informasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2012 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2012 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Perhubungan seperti Eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Pada Tahun Anggaran 2012, Kementerian Perhubungan (UAPA) bertugas melakukan penggabungan dan pengkoordinasian laporan keuangan dari 8 (delapan) Unit Eselon I (UAPPA-E1), yaitu:

1. Sekretariat Jenderal sebanyak 18 (delapan belas) kantor/satuan kerja;
2. Inspektorat Jenderal sebanyak 1 (satu) kantor/satuan kerja;
3. Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 82 (delapan puluh dua) kantor/satuan kerja;
4. Ditjen Perhubungan Laut sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kantor/satuan kerja;
5. Ditjen Perhubungan Udara sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) kantor/satuan kerja;
6. Ditjen Perkeretaapian sebanyak 23 (dua puluh tiga) kantor/satuan kerja;
7. Badan Litbang Perhubungan sebanyak 5 (lima) kantor/satuan kerja;
8. Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebanyak 24 (dua puluh empat) kantor/satuan kerja.

Jumlah keseluruhan satuan kerja di lingkup Kementerian Perhubungan adalah 666 (enam ratus enam puluh enam) satker termasuk 7 (tujuh) satker BLU pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 666 (enam ratus enam puluh enam) satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	01	Setjen	18	-	-	-	-	-	-	-	18
2	02	Itjen	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	03	Ditjen Hubdat	82	-	-	-	-	-	-	-	82
4	04	Ditjen Hubla	5	-	345	-	-	-	-	-	350
5	05	Ditjen Hubud	7	-	156	-	-	-	-	-	163
6	08	Ditjen KA	23	-	-	-	-	-	-	-	23
7	11	Badan Litbang	5	-	-	-	-	-	-	-	5
8	12	Badan PSDM	24	-	-	-	-	-	-	-	24
Jumlah			165	-	501	-	-	-	-	-	666

Keterangan:

M : Menyampaikan

TM : Tidak Menyampaikan

SAI (Sistem Akuntansi Instansi) terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2012 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/20110 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 4.
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	- Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan - Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Sampai saat Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, Kementerian Perhubungan belum menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1 Pendapatan Negara dan Hibah**

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp1.331.979.
615.033,-*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 1.331.979.615.033,- atau mencapai 195 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 683.052.851.436,-. Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Perhubungan terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 5 .
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	897.120.727	7.549.061.024	841,47
2	Pendapatan Jasa	480.165.867.709	999.236.806.429	208,10
3	Pendapatan Bunga	0	6.547.146	0
4	Pendapatan Pendidikan	91.500.000	11.647.506.939	12.729,51
5	Pendapatan Iuran dan Denda	0	12.696.093.988	0
6	Pendapatan Lain-lain	0	54.421.269.440	0
7	Pendapatan Jasa Layanan Umum	200.390.605.000	238.197.475.540	118,86
8	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.507.758.000	3.248.797.304	215,47
9	Pendapatan BLU Lainnya	0	4.976.057.223	0
Jumlah		683.052.851.436	1.331.979.615.033	195,00

Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2012 mengalami penurunan sebesar Rp 110.772.055.634,- atau 7,68 persen dibandingkan TA 2011 yang disebabkan oleh yang menurunnya Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian pada Ditjen Perhubungan Laut. Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6.
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011

No	Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	7.549.061.024	7.341.160.224	207.900.800	2,83
2	Pendapatan Jasa	999.236.806.429	1.178.754.195.547	(179.517.389.118)	(15,23)
3	Pendapatan Bunga	6.547.146	9.534	6.537.612	68571,5
4	Pendapatan Kejaksaan & Tipikor	0	1.000.000	(1.000.000)	(100,00)
5	Pendapatan Pendidikan	11.647.506.939	5.563.642.129	6.083.864.810	109,35
6	Pendapatan Iuran dan Denda	12.696.093.988	9.623.178.869	3.072.915.119	31,93
7	Pendapatan Lain-lain	54.421.269.440	37.436.711.327	16.984.558.113	45,37
8	Pendapatan Jasa Layanan Umum	238.197.475.540	197.703.796.505	40.493.679.035	20,48
9	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	3.248.797.304	3.489.022.400	(240.225.096)	(6,89)
10	Pendapatan BLU Lainnya	4.976.057.223	2.838.954.132	2.137.103.091	75,28
Jumlah		1.331.979.615.033	1.442.751.670.667	(110.772.055.634)	(7,68)

B.2 Belanja Negara

Realisasi belanja Kementerian Perhubungan pada TA 2012 adalah sebesar Rp 30.083.615.007.934,- atau sebesar 88,69 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Realisasi Belanja tersebut terdiri dari Belanja Transaksi Kas sebesar Rp 30.005.874.401.184,- dan Belanja Transaksi Non Kas sebesar Rp 77.740.606.750,-. Anggaran Kementerian Perhubungan pada TA 2012 sebesar Rp 33.918.359.368.997,-. Anggaran dan realisasi belanja transaksi kas TA 2012 menurut program dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 7.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2012

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
01.101	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	462.851.552.000	412.487.475.004	89,21
01.103	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	40.122.054.000	33.795.471.873	84,29
01.106	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	126.389.191.000	93.004.134.811	73,60
01.107	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	216.343.144.000	175.827.306.854	81,29

01.108	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	2.051.493.088.979	1.816.335.251.265	88,57
03.305	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	261.496.913.000	206.200.852.905	79,13
08.803	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenhub	28.976.991.000	25.326.064.106	87,52
08.805	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	591.264.659.000	459.674.138.709	77,75
08.806	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	2.733.416.028.000	2.496.602.249.803	91,35
08.807	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	9.035.798.345.000	8.357.588.127.213	92,50
08.808	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	9.511.491.415.018	8.181.842.161.416	86,05
08.809	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	6.904.623.555.000	5.978.559.038.291	86,61
10.004	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	194.878.759.000	183.336.466.775	94,08
06.605	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	1.759.213.674.000	1.585.295.662.159	90,13
08.809	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara (Non Kas)	0	71.674.131.750	0,00
06.605	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (Non Kas)	0	6.066.475.000	0,00
Jumlah		33.918.359.368.997	30.083.615.007.934	88,69

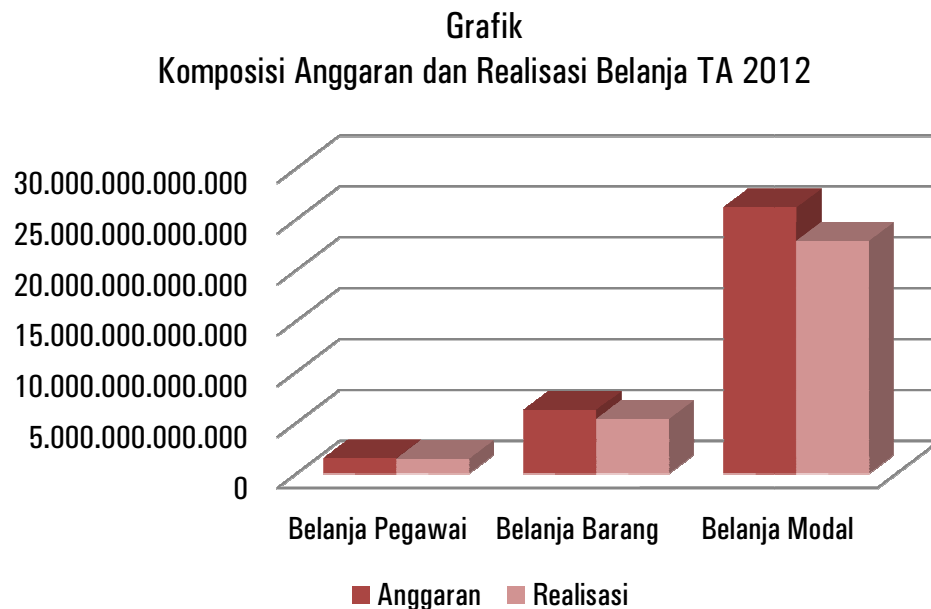
Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
51	Belanja Pegawai	1.500.030.891.156	1.441.874.025.790	96,12
52	Belanja Barang	6.254.498.915.426	5.365.872.795.980	85,79
53	Belanja Modal	26.163.829.562.415	23.275.868.186.164	88,96
Jumlah		33.918.359.368.997	30.083.615.007.934	88,69

Realisasi Belanja Modal pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 23.275.868.186.164,- terdiri dari Belanja Modal dari Transaksi Kas senilai Rp 23.198.127.579.414,- dan Belanja Modal dari Transaksi Non Kas senilai Rp 77.740.606.750,-.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



*Realisasi
Belanja Negara
Rp30.083.615.
007.934,-*

Realisasi belanja TA 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.973.571.774.120,- dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain oleh naiknya belanja pegawai, adanya pembangunan gedung kantor dan kenaikan atas belanja barang berupa belanja pemeliharaan. Perbandingan realisasi belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 9.
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 dan 2011

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		TA 2012	TA 2011	Rp	%
51	Belanja Pegawai	1.441.874.025.790	1.326.418.456.631	115.455.569.159	8,70
52	Belanja Barang	5.365.872.795.980	3.519.221.932.184	1.846.650.863.796	52,47
53	Belanja Modal	23.275.868.186.164	15.264.402.844.999	8.011.465.341.165	52,48
Jumlah		30.083.615.007.934	20.110.043.233.814	9.973.571.774.120	49,59

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja

Pegawai

Rp1.441.874.0

25.790,-

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Realisasi belanja pegawai TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 1.441.874.025.790,- dan Rp 1.326.418.456.631,-. Kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar Rp 115.455.569.159,- atau sebesar 8,70 persen antara lain disebabkan kenaikan belanja gaji pokok dan tunjangan seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011

Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	901.255.494.408	825.780.436.762	75.475.057.646	9,14
Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.067.372	28.416.848	(7.349.476)	(25,86)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	66.171.343.852	59.357.511.700	6.813.832.152	11,48
Belanja Tunj. Anak PNS	19.256.989.179	17.406.937.193	1.850.051.986	10,63
Belanja Tunj. Struktural PNS	20.058.405.000	20.019.964.856	38.440.144	0,19
Belanja Tunj. Fungsional PNS	15.720.220.000	14.829.343.900	890.876.100	6,01
Belanja Tunj. PPh PNS	27.856.207.754	22.027.523.872	5.828.683.882	26,46
Belanja Tunj. Beras PNS	61.252.813.820	62.111.862.802	(859.048.982)	(1,38)
Belanja Uang Makan PNS	167.802.966.594	139.324.098.400	28.478.868.194	20,44
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	18.225.477.579	19.514.638.531	(1.289.160.952)	(6,61)
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil PNS	1.852.625.000	1.798.935.000	53.690.000	2,98
Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	11.801.365.000	11.661.225.000	140.140.000	1,20

Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	1.004.041.700	1.154.749.100	(150.707.400)	13,05)
Belanja Tunj. Umum PNS	60.145.515.000	63.157.343.000	(3.011.828.000)	(4,77)
Belanja Tunj. Profesi Dosen	2.959.141.900	0	2.959.141.900	0
Belanja Tunj. Tambahan Penghasilan Guru PNS	0	0	0	0
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	0	0	0
Belanja Uang Honor Tetap	4.691.250.000	20.366.737.500	(15.675.487.500)	(76,97)
Belanja Uang Lembur	44.723.670.100	33.112.459.150	11.611.210.950	35,07
Belanja Vakasi	17.493.279.500	15.248.157.500	2.245.122.000	14,72
Realisasi Belanja Bruto	1.442.291.873.758	1.326.900.341.114	115.391.532.644	8,69
<i>Pengembalian Belanja</i>	417.847.968	481.884.483	(64.036.515)	(13,29)
Realisasi Belanja Netto	1.441.874.025.790	1.326.418.456.631	115.455.569.159	8,70

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp 5.365.872.795.980,-
795.980,-

Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.

Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 5.365.872.795.980,- dan Rp 3.519.221.932.184,-. Kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp 1.846.650.863.796,- atau 52,47 persen antara lain disebabkan kenaikan belanja barang operasional dan belanja pemeliharaan. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11.
Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011

Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Barang Operasional	718.195.719.980	519.303.833.457	198.891.886.523	38,29
Belanja Barang Non Operasional	1.230.561.436.815	1.419.924.473.042	(189.363.036.227)	(13,33)
Belanja Jasa	243.933.097.631	203.979.789.284	39.953.308.347	19,58
Belanja Pemeliharaan	1.134.890.366.627	741.044.781.202	393.845.585.425	53,14
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	531.230.898.263	447.518.532.588	83.712.365.675	18,70
Belanja Perjalanan Luar Negeri	37.674.276.486	40.927.126.769	(3.252.850.283)	(7,94)
Belanja Barang BLU	179.929.412.214	148.767.188.394	31.162.223.820	20,94
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.294.946.081.868	0	1.294.946.081.868	0
Realisasi Belanja Bruto	5.371.361.289.884	3.521.465.724.736	1.849.895.565.148	52,53
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>(5.488.493.904)</i>	<i>(2.243.792.552)</i>	<i>(3.244.701.352)</i>	<i>144,60</i>
Realisasi Belanja Netto	5.365.872.795.980	3.519.221.932.184	1.846.650.863.796	52,47

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp 23.275.
868.186.164,-

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 23.275.868.186.164,- dan Rp 15.264.402.844.999,-. Kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar 52,48 persen antara lain disebabkan kenaikan belanja modal tanah dan belanja modal gedung dan bangunan. Realisasi Belanja Modal pada Kementerian Perhubungan TA. 2012 senilai Rp 23.275.868.186.164,- terdiri dari Belanja Modal dari Transaksi Kas senilai Rp 23.198.127.579.414,- dan Belanja Modal dari Transaksi Non Kas senilai Rp 77.740.606.750,-.

Belanja Modal dari Transaksi Non Kas Kementerian Perhubungan senilai Rp 77.740.606.750,- merupakan hibah langsung berupa barang/jasa yang telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dan dicatat berdasarkan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung,

Barang/Jasa, dan Surat Berharga (MPHL-BJS) yang diterbitkan KPPN Jakarta VI. Transaksi ini terdapat pada Ditjen Perhubungan Udara dan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Ditjen Perhubungan Udara berupa Hibah Langsung Luar Negeri dari ORET (Belanda) dan JICA (Jepang) senilai total Rp 71.674.131.750,-.
2. Pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan hibah barang dari PT. Garuda Indonesia (Persero) berupa gedung ruang makan/aula, asrama taruna dan kendaraan roda 4 (empat) dengan total nilai Rp 6.066.475.000,-.

Tabel 12.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011

Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Naik/ (Turun)	
			(Rp)	%
I. TRANSAKSI KAS				
Belanja Modal Tanah	956.514.731.953	490.148.917.233	466.365.814.720	95,15
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.904.442.943.612	4.208.378.547.516	(303.935.603.904)	(7,22)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.671.950.550.329	2.349.377.000.695	(677.726.450.366)	(28,84)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.542.922.017.107	7.464.170.169.305	8.078.751.847.802	108,23
Belanja Modal Lainnya	1.086.707.765.673	749.067.812.924	337.639.952.749	45,07
Belanja Modal BLU	36.984.081.450	7.868.505.630	29.115.575.820	370,03
Realiasi Belanja Bruto	23.199.522.090.124	15.269.010.953.303	7.930.511.136.821	51,94
<i>Pengembalian Belanja</i>	1.394.510.710	4.608.108.304	(3.213.597.594)	(69,74)
Realisasi Belanja Transaksi Kas Netto	23.198.127.579.414	15.264.402.844.999	7.933.724.734.415	51,98
II. TRANSAKSI NON KAS				
Belanja Modal Non Kas	77.740.606.750	0	77.740.606.750	0
Realisasi Belanja Transaksi Non Kas	77.740.606.750	0	77.740.606.750	0
JUMLAH RAYA (Transaksi Kas + Transaksi Non Kas)	23.275.868.186.164	15.264.402.844.999	8.011.465.341.165	52,48

C. CATATAN PENTING

1. Hibah

Pagu Anggaran Hibah Tahun 2012 sebesar Rp 125.766.357.000,- dengan realisasi sebesar Rp 15.174.813.981,-, yang terdiri dari Hibah Luar Negeri dan Hibah Langsung Luar Negeri, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hibah Luar Negeri, pagu anggaran sebesar Rp 95.081.257.000,- dan realisasi sebesar Rp 2.699.604.781,- atau sebesar 2,84 persen; dan
- b. Hibah Langsung Luar Negeri, pagu anggaran sebesar Rp 30.685.100.000,- dan realisasi sebesar Rp 12.475.209.200,- atau sebesar 40,66 persen.

Hibah pada Kementerian Perhubungan terdapat pada Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagai berikut :

a. Ditjen Perhubungan Darat

NO	NAMA SATKER	NEGARA	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan	Perancis (SNCF)	Integrated Public Transportation Masterplan for Bandung Metropolitan Area (BMA)	Selesai Tahun 2010, namun belum ada BAST karena masih proses pengecekan. Biaya € 600.000,00
2	Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan	Jerman (GTZ)	Sustainable Urban Transportation Improvement Project (SUTIP)	Masih dalam proses Agreement di Ditjen Hubdat.
3	Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan	Jepang (JICA)	Jabodetabek Public Transportation Policy Implementation Strategy	Selesai Maret 2012

b. Ditjen Perhubungan Laut

NO	NAMA SATKER	NEGARA	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Multi Negara (Aids to Navigation Fund)	Bantuan pemeliharaan dan penggantian peralatan kenavigasian Indonesia di Selat Malaka (<i>Maintenance & Replacement of Aids to Navigation in the Strait of Malacca</i>)	Register 70878801. Sudah disahkan pendapatan sebesar Rp. 14.028.658.958,- (USD 1.576.145,12) dan belanja sebesar Rp. 12.856.969.310,- (posisi Audited 2011). Terdapat Pendapatan hibah sebesar Rp.13.013.437.164,-. Pada tahun 2012 realisasi sebesar Rp 12.475.209.200,-
2	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	China	Merupakan bagian dari kegiatan <i>Maintenance & Replacement of Aids to Navigation in the Strait of Malacca</i> , yang berupa <i>replacement</i> sarana bantu navigasi pelayaran Indonesia yang rusak karena tsunami	Usulan registrasi senilai CNY 14.000 telah disetujui dengan nomor register 7278801

3	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Jepang	Vessel Traffic System (VTS) Selat Malaka	Register 70991901. Nilai hibah pengadaan VTS secara keseluruhan sebesar ¥ 1.092.430.000 (sudah ada BAST) dan telah diinput dalam SIMAK BMN sebesar Rp. 111.427.860.000,-
4	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Jepang	Vessel Traffic System (VTS) Selat Malaka Phase 2	Nomor register 71247101.
5	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Norad	Consultancy Services for VTS	Nomor Register 71604001. Yang sudah disahkan sebesar Rp. 845.820.000,-
6	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Multi Negara (World Bank)	Marine Electronic Highway (MEH)	Register 70659501 Belum ada realisasi. kontrak tgl 4 maret 2011 nomor kontrak 01/PP/PKP/III-11 tgl. 4 Maret 2011

Keterangan :

1. Hibah *Maintenance & Replecement Of Aids To Navigation In The Straits Of Malacca & Singapore* (*Aids To Navigation Fund* | ANF).

- a. Dalam rangka kerjasama 3 (tiga) Negara Pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) maka dengan dukungan *International Maritime Organization (IMO)* dalam wadah *Tripartite Technical Expert Group (TTEG)*, telah dibentuk forum kerjasama *Cooperative Mechanism* yang didasarkan pada kesepakatan *Ministerial Meeting* di Batam tahun 2005 untuk mengaplikasikan *article 43 UNCLOS 1982* yang mendorong peran serta *User States* dan *Stakeholders* dalam peningkatan keselamatan & perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.
- b. *Cooperative Mechanism* memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu :

1) *Cooperation Forum (CF)*.

Komponen CM yang bertujuan untuk meningkatkan dialog dan diskusi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan di Selat Malaka & Singapura, serta untuk mengidentifikasi dan menyusun prioritas proyek dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka & Singapura.

2) *Project Coordination Committee (PCC)*.

Komponen CM yang bertujuan untuk mengkoordinasikan implementasi berbagai kegiatan proyek yang dilaksanakan dalam kerangka CM.

3) *Aids to Navigation Fund (ANF)*.

Komponen CM yang bertujuan untuk menghimpun kontribusi dari *user states* dan *stakeholders* dalam mengelola dan memelihara Sarana

Bantu Navigasi di selat Malaka & Singapura. Untuk periode 2008-2011 Sekretariat ANF adalah Malaysia.

c. Kerjasama ***Cooperative Mechanism*** menyiapkan 6 (enam) *Project* yang dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu :

- 1) *Project-1 : Removal of wrecks in the Traffic Separation Scheme in The Straits of Malacca and Singapore.* (diusulkan oleh Malaysia).
- 2) *Project-2 : Co-operation and capacity building on hazardous and noxious substance (HNS) preparedness and response in The Straits of Malacca and Singapore.* (diusulkan oleh Malaysia).
- 3) *Project-3 : Demonstration project of class B Automatic Identification System (AIS) transponder on small ships.* (diusulkan oleh Singapura).
- 4) *Project-4 : Setting up tide, current and wind measurement systems for the Straits of Malacca and Singapore to enhance navigational safety and marine environment protection.* (diusulkan oleh Singapura).
- 5) *Project-5 : Replacement and maintenance of aids to navigation in the Straits of Malacca and Singapore.* (diusulkan oleh Indonesia).
- 6) *Project-6 : Replacement of aids to navigation damaged by the tsunami disaster of December 2004.* (diusulkan oleh Indonesia).

Project-5 bertujuan untuk melakukan pemeliharaan dan penggantian SBNP di sepanjang *Traffic Separation Scheme* (TSS) Selat Malaka dan Selat Singapura, dan implementasinya dimulai tahun 2009, dengan dana yang dihimpun dari *User States* dan *Stake Holders* dalam wadah ***Aids to Navigation Funds*** (ANF), untuk persiapan pelaksanaan *Project-5* akan dilaksanakan ***Assessment Survey*** SBNP Indonesia di sepanjang TSS.

Cooperative Mechanism direncanakan selama 10 (sepuluh) tahun dan dana hibah untuk Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun (2009 s.d 2018) direncanakan sebesar USD 32.038.213,00.

Project-6 dimaksudkan untuk menunjang keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura melalui pelaksanaan kegiatan *replacement* Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Indonesia yang rusak/roboh

karena tsunami, dengan pihak China sebagai *user state*. Pihak China akan melaksanakan pembangunan rambu Suar di 2 (dua) lokasi yaitu rambu Suar Ulee Lheu dan rambu Suar Malahayati. Usulan Registrasi Hibah Langsung *Project-6* dari Pemerintah China senilai CNY 14.000 tersebut telah disetujui dengan nomor 72748801.

d. Realisasi penerimaan hibah sampai saat ini sebagai berikut :

- 1) TA 2009 / 2010 dana hibah yang masuk ke rekening satker sebesar USD 2.763.115,00
- 2) Realisasi TA 2009 / 2010 sebesar USD 2.753.441,10 sehingga saldo per 31 Desember 2010 sebesar USD 9.673,90
- 3) TA 2011 realisasi belanja yang telah disahkan sebesar Rp 12.856.969.310,- saldo posisi 31 Desember 2011 USD 120.220,95 (Rekening ANF pada Bank BNI Cabang Harmoni).
- 4) Sampai dengan periode 31 Desember 2012 realisasi belanja hibah langsung luar negeri adalah sebesar Rp 12.475.209.200,-.

Posisi Saldo per 31 Desember 2012 Rekening ANF pada Bank BNI Cabang Harmoni (Nomor Rekening 0165113802) adalah sebesar USD 234.611,02 dan Rekening Norad pada Bank BNI Cabang Harmoni (Nomor Rekening 0220214025) adalah sebesar USD 83.996,73.

c. Ditjen Perhubungan Udara

NO	NAMA SATKER	NEGARA	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	Jepang (JICA)	Project for Strengthening Capacity on Ensuring Safe and Efficient Aircraft Operation	Register hibah 70671901. Data tidak diperoleh dari donor
2	Direktorat Bandar Udara	Jepang (JICA)	Project for the Masterplan Study on the Multiple Airport Development for Jakarta Metropolitan Area	Register hibah 71458801. Realisasi penyerapan anggaran tidak dapat diketahui karena tidak adanya laporan penyerapan dari donor, secara informal diketahui telah dilakukan penyerapan sebesar JP¥ 149,000,000, namun belum dapat disahkan sebagai penyerapan karena belum surat notice of disbursement dari pihak donor.

3	Direktorat Keamanan Penerbangan	Belanda (ORET) Belanda (INK BANK)	Procurement of ARFF Equipment Belanda (Grant) Procurement of ARFF Equipment Belanda (Loan)	Register (hibah) 71118801 dan register (loan) 40101901. Pengadaan dan pengiriman 30 unit PKP-PK di 29 Bandara (Hibah 39,8%, loan 60,2%). Telah disampaikan surat Direktur Keamanan Penerbangan nomor AU/1316/DKP.171/II/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 tentang <i>Status the Procurement and Delivery of 30 Unit Airport Rescue and Fire Fighting Vehicles</i> kepada Kabag Penyelesaian Transaksi Pinjaman Luar Negeri Bank Indonesia sebagai bahan kelengkapan administrasi untuk penerbitan SP3. Pada Tahun 2012 sampai dengan posisi 31 Desember 2012 yang telah mendapat pengesahan adalah sebesar Rp 32.009.821.180,17
4	Direktorat Navigasi	Jepang (JICA)	Project for Improvement Aviation Safety Policy (Hibah)	Register 71043301. Data tidak diperoleh dari donor
5	Direktorat Navigasi Penerbangan	USA (USTDA)	Restructuring and Regulatory Reform for Civil Aviation Authority Project	Register 70923301. Kontrak baru ditandatangani pada akhir September 2010. Dalam tahap pengumpulan data-data terkait studi dimaksud
6	Direktorat Keamanan Penerbangan	Jepang (JICA)	Airport Security System Improvement	Register 71287101. Grant Agreement sudah ditandatangani pada tanggal 8 November 2010. Kontrak konsultan sudah ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2010 dan kontrak pengadaan barang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2011. Pada Tahun 2012 sampai dengan posisi 31 Desember 2012 yang telah mendapat pengesahan adalah sebesar Rp 39.664.310.570,-.
7	Direktorat Keamanan Penerbangan	Australia (AusAID)	Assistance for Security at Denpasar Airport	Merupakan kerjasama keamanan penerbangan antara Ditjen Hubud dengan Pemerintah Australia berupa penempatan atau bantuan tenaga ahli dibidangan keamanan penerbangan. Kerjasama tertuang dalam MoU bidang Transportasi antara Pemerintah RI dgn Pemerintah Australia serta dalam Lombok Treaty 2008. Data realisasi tidak diperoleh dari donor.

d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

NO	NAMA SATKER	NEGARA	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Indonesia (Pemkot Madiun dan Pemkab Pontianak)	Hibah tanah untuk pembangunan Lembaga Pendidikan	- Untuk hibah tanah dari Pemkot Madiun, sudah terbit Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Madiun dengan BPSDM Perhubungan Nomor : 030 / 13 / 401.101 /2011 Nomor : HK.201/D.920/BPSDMP-2011, namun belum melaporkan ke Kementerian Keuangan RI. Sertifikat masih dalam proses.

				- Untuk Hibah dari Pemkab Pontianak, sudah terbit Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Pontianak dengan Pemerintah RI c.q Kementerian Perhubungan RI namun belum melaporkan ke Kementerian Keuangan RI. Sertifikat masih dalam proses.
2.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal	Indonesia (Pemkot Tegal)	Hibah tanah untuk Pengembangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal menjadi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan	Sudah terbit Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Tegal dengan Pemerintah RI c.q Kementerian Perhubungan RI Nomor : 030 / 006 Nomor : HK.201/D.1705/BPSDMP-2011, namun belum melaporkan ke Kementerian Keuangan RI. Sertifikat masih dalam proses.
3.	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (Curug)	Indonesia (PT. Garuda Indonesia (Persero))	Hibah berupa gedung ruang makan/aula, asrama taruna dan kendaraan roda 4 (empat) dengan total nilai Rp 6.066.475.000. Nomor Register 73253301	Hibah tersebut telah dicatat dalam Laporan SIMAK BMN berdasarkan Surat Pengesahan dari DJPU Nomor SP3HL-BJS-0272/PU.6/2012 tanggal 13 Desember 2012.
4.	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut	Indonesia (Pemda Aceh, Pemda Sorong dan Pemkot Padang)	Hibah tanah untuk pembangunan lembaga pendidikan.	- Untuk hibah dari Pemda Aceh, sudah terbit Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah dari Pemerintah Aceh kepada BPSDM Perhubungan Nomor : 18/BA/ 2012 Nomor : BA-058/BPSDMP-12, namun belum melaporkan ke Kementerian Keuangan RI. Sertifikat sudah terbit atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Perhubungan. - Untuk hibah dari Pemda Sorong, Sudah dalam Proses Pensertifikatan dari Pemkot Sorong ke Pemerintah RI. - Untuk Hibah dari Pemkot Padang, status kepemilikan tanah masih belum jelas.

Kesulitan dalam pelaporan dan pengungkapan hibah khususnya hibah langsung terutama karena pihak donor hanya menyampaikan laporan tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan dan tidak pernah melaporkan aspek realisasi keuangan khususnya kepada Satker terkait dan umumnya merupakan pembayaran langsung dari donor kepada konsultan/*expert*.

Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan, sedangkan Kemenhub hanya mencatat hibah dari sisi Belanja dan pencatatan aset yang diterima sesuai BAST hibah serta mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Kendala dan Hambatan dalam Penyerapan Anggaran

Realisasi belanja Kementerian Perhubungan pada TA 2012 adalah sebesar Rp 30.083.615.007.934,- atau sebesar 88,69 persen dari anggarannya. Beberapa kendala dan hambatan dalam penyerapan/pelaksanaan anggaran pada Kementerian Perhubungan antara lain :

- a. Adanya dana yang masih bertanda bintang/blokir;
- b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terlambat terutama atas kegiatan yang muncul di APBN-P;
- c. Menunggu kesiapan jaringan untuk lelang dengan menggunakan sistem pelelangan secara elektronik (*e-procurement*);
- d. Ketidakjelasan status kepemilikan tanah, seperti proses hibah tanah yang belum selesai, tanah yang masih dalam sengketa atau tanah yang belum bersertifikat/belum mempunyai bukti kepemilikan;
- e. Adanya perubahan spesifikasi teknis/desain yang harus disesuaikan dengan lapangan;
- f. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) bersertifikat/SDM yang bersedia menjadi panitia lelang;
- g. Adanya kebijakan pemotongan anggaran.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp810.754.169*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (Audited) adalah sebesar Rp 810.754.169,- dan sebesar Rp 473.989.973,-.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 13.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I

Kode	Uraian Eselon I	31-Dec-12	31-Dec-11	Kenaikan/Penurunan
01	Sekretaris Jenderal	188.763.405	225.898.562	(37.135.157)
02	Inspektorat Jenderal	-	11.495.000	(11.495.000)
03	Ditjen Perhubungan Darat	43.113.676	12.207.000	30.906.676
04	Ditjen Perhubungan Laut	144.993.773	177.431.196	(32.437.423)
05	Ditjen Perhubungan Udara	414.842.294	36.451.764	378.390.530
08	Ditjen Perkeretaapian	19.023.521	5.862.100	13.161.421
11	Badan Litbang Perhubungan	17.500	0	17.500
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	-	4.644.351	(4.644.351)
	Total	810.754.169	473.989.973	336.764.196

Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut keseluruhannya telah disetor ke rekening Kas Negara pada awal tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Kode	Uraian Eselon I	31-Dec-12	Penyetoran Ke Kas Negara	Sisa Kas Yang belum Disetor Ke Kas Negara
01	Sekretaris Jenderal	188.763.405	188.763.405	0
02	Inspektorat Jenderal	-	0	0
03	Ditjen Perhubungan Darat	43.113.676	43.113.676	0
04	Ditjen Perhubungan Laut	144.993.773	144.993.773	0
05	Ditjen Perhubungan Udara	414.842.294	414.842.294	0
08	Ditjen Perkeretaapian	19.023.521	19.023.521	0
11	Badan Litbang Perhubungan	17.500	17.500	0
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	-	0	0
	Total	810.754.169	810.754.169	-

Penyetoran sisa kas bendahara pengeluaran di satker PKKPJT, atase perhubungan di Kuala Lumpur, Jeddah, Den Haag, Montreal, Tokyo, Singapura, Washington DC dan London di lakukan bulan Januari 2013. Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2012 Kuala Lumpur disetorkan kembali pada bulan Pebruari 2013.

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp 19,029 Miliar*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) sebesar Rp 19.029.872.722,- dan sebesar Rp 10.024.539.870,-.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas negara.

Tabel 15.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I

Kode	Uraian Eselon I	31-Dec-12	31-Dec-11	Kenaikan/Penurunan
03	Ditjen Perhubungan Darat	15.347.440	1.452.000	13.895.440
04	Ditjen Perhubungan Laut	12.335.524.147	3.732.335.536	8.603.188.611
05	Ditjen Perhubungan Udara	3.475.278.493	4.715.325.031	(1.240.046.538)
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	3.203.722.642	1.575.427.303	1.628.295.339
	Total	19.029.872.722	10.024.539.870	9.005.332.852

Tabel 16.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
03	Ditjen Perhubungan Darat	15.347.440	15.347.440	0
04	Ditjen Perhubungan Laut	12.335.524.147	12.335.524.147	0
05	Ditjen Perhubungan Udara	3.475.278.493	3.475.278.493	0
12	BPSDM Perhubungan	3.203.722.642	3.203.722.642	0
	Total	19.029.872.722	19.029.872.722	0

Pada Ditjen Perhubungan Darat saldo Kas di Bendahara Penerimaan terdapat pada satker Pelabuhan Penyeberangan Kariangu senilai Rp. 6.077.440,- dan Balai PLJSKB di Bekasi senilai Rp. 9.270.000,-.

Pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 3.203.722.642,- Terdiri dari :

NO	NAMA SATKER	SALDO AWAL 2011	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO PER 31 DES 2012
1	ATKP MAKASSAR	1.081.150.400	2.990.731.172	2.954.028.625	1.117.852.947
2	ATKP MEDAN	166.000.000	2.489.318.430	744.640.900	1.910.677.530
4	STPI CURUG	-	22.943.091.565	22.926.481.400	16.610.165,00
5	STTD BEKASI	322.150.950	3.040.000.000	3.203.568.950	158.582.000
6	BP2IP Mauk	6.125.953	-	6.125.953	-
TOTAL		1.575.427.303	31.463.141.167	29.834.845.828	3.203.722.642

Saldo yang terdapat pada ATPK Makassar Rp 1.117.852.947,-, ATPK Medan Rp. 1.910.677.530,- dan pada STTD Bekasi sebesar Rp. 158.582.000,- rencananya akan dipakai kembali untuk keperluan taruna/diklat. Pada STPI Curug sebesar Rp 16.610.165,- telah disetorkan ke Kas Negara dengan SSBP Nomor : 001/I/STPI-2013 dan Nomor : 002/I/STPI-2013. Untuk satker BP2IP Mauk sudah dilakukan penyetoran pada bulan Januari 2013.

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp 3,329 miliar*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 3.329.183.847,- dan sebesar Rp 1.873.343.972,-

Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai.

Tabel 17.
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Keterangan	31-Des-12
1	Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara	Rp 310.400
2	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp 26.477.155
3	Perjalanan dinas Desember TA 2012 yang belum dibayarkan	Rp 221.259.350
4	Pembayaran potongan pajak	Rp 200.000
5	Kas Lainnya di K/L dari hibah	Rp 3.080.936.942
	Jumlah	Rp 3.329.183.847

Tabel 18.
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I

Kode	Eselon I	Jenis Transaksi	Jumlah
03	Ditjen Perhubungan Darat	Jasa giro yang belum disetor ke kas negara	45.100
		Perjalanan dinas Des TA 2012 yang belum dibayarkan	221.259.350
		Pembayaran potongan pajak	200.000
04	Ditjen Perhubungan Laut	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	26.477.155
		Kas Lainnya di K/L dari Hibah	3.080.936.942
05	Ditjen Perhubungan Udara	Jasa Giro Yang belum disetor ke Kas Negara	265.300
	Total		3.329.183.847

Jumlah tersebut di atas telah diselesaikan dengan melakukan penyetoran dan pendistribusian kepada pihak yang terkait.

C.1.4 Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)

*Kas pada BLU
Rp 161.040
miliar*

Jumlah Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 161.040.871.577,- dan Rp 132.850.346.828,-. Kas pada BLU ini merupakan saldo penerimaan kas yang berasal dari pendapatan BLU yang belum digunakan, terdapat pada 7 (tujuh) Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tabel 19.
Besarnya Saldo Kas pada masing-masing BLU

Badan Layanan Umum	31-Des-12	31-Des-11	Kenaikan/Penurunan
STIP Jakarta	47.720.408.641	35.981.347.353	11.739.061.288
BP 2IP Surabaya	16.333.804.134	11.384.123.049	4.949.681.085
BP 3IP Jakarta	58.641.080.798	59.567.583.853	(926.503.055)
ATKP Surabaya	5.007.222.913	2.615.141.470	2.392.081.443
PIP Semarang	13.677.658.652	9.100.190.715	4.577.467.937
PIP Makassar	16.777.337.087	11.902.272.585	4.875.064.502
BPPTD Tegal	2.883.359.352	2.299.687.803	583.671.549
Jumlah	161.040.871.577	132.850.346.828	28.190.524.749

C.1.5 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

*Belanja Dibayar
Dimuka
Rp 160,59 juta*

Jumlah Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 160.596.995,- dan sebesar Rp 511.735.738,- merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan atau perjanjian.

Tabel 20.
Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-12	31-Des-11	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	60.000.000	57.200.000	2.800.000
05	Ditjen Perhubungan Udara	100.596.995	454.535.738	(353.938.743)
	Total	160.596.995	511.735.738	(351.138.743)

Belanja Dibayar Dimuka pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 60.000.000,- merupakan uang muka belanja Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu pada KSOP Malahayati berupa sewa gedung kantor. Sedangkan pada Ditjen Perhubungan Udara berupa sewa di bayar di muka atas rumah operasional Bandar Udara Kualanamu di Medan.

C.1.6 Uang Muka Belanja (*Prepayment*)

*Uang Muka
Belanja Rp19.83
miliar*

Jumlah Uang Muka Belanja (*prepayment*) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 19.835.100.558,- dan sebesar Rp 0. Merupakan Belanja Modal Dibayar Dimuka atas kegiatan pembangunan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2012 yang terdapat pada :

No	Satker	Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Bandara Komodo, Labuan Bajo	Pembangunan Terminal Bandara Komodo di Labuan Bajo	917.749.145.
2	Bandara Komodo, Labuan Bajo	Lanjutan Pembangunan Terminal Bandara Komodo di Labuan Bajo	648.169.927
3	Bandara Frans Seda, Maumere	Lanjutan Pembuatan Pagar Pengaman Bandara Frans Seda di Maumere	639.052.117
4	Bandara Gewayantana, Larantuka	Pelapisan Landas Pacu Bandara Gewayantana di Larantuka	17.630.129.369
	Total		19.835.100.558

C.1.7 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak Rp 146.32
miliar*

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 146.322.771.124,- dan sebesar Rp 187.044.736.967,- yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Tabel 21.

Piutang Bukan Pajak per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-12
01	Sekretaris Jenderal	42.750.058
04	Ditjen Perhubungan Laut	137.473.441.366
05	Ditjen Perhubungan Udara	8.781.124.700
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	25.455.000
	Total	146.322.771.124

Piutang Bukan Pajak Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2012 sebesar Rp 42.750.058,- merupakan piutang yang berasal dari sewa rumah dinas satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang disebabkan pembayarannya dilakukan secara langsung tidak melalui pemotongan gaji.

Piutang Bukan Pajak Ditjen Perhubungan Laut per 31 Desember 2012 sebesar Rp 137.473.441.366,- merupakan piutang yang berasal dari sewa.

Piutang Bukan Pajak Ditjen Perhubungan Udara per 31 Desember 2012 sebesar Rp 8.781.124.700 merupakan piutang yang berasal dari sewa maskapai penerbangan.

Piutang Bukan Pajak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan senilai Rp. 25.455.000,- merupakan kewajiban dari Tunggalan Pembayaran Uang Makan Taruna pada Satker PIP Makassar.

Mutasi Piutang Bukan Pajak Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2011	Rp 187.044.736.967
Mutasi tambah:	
- Piutang sewa	Rp 25.091.620.858
- Piutang per makanan taruna	Rp 25.455.000
Mutasi kurang:	
- Pelunasan Tahun 2012	(Rp 65.839.041.701)
Saldo per 31 Desember 2012	Rp 146.322.771.124

C.1.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak minus
Rp28,40 miliar*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar minus Rp 28.407.901.233,- dan sebesar Rp 253.331.744,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Pada Tahun 2012 Kementerian Perhubungan secara bertahap telah menerapkan Penyisihan Piutang Tak Tertagih piutang sesuai PMK 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penerapan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada neraca belum dilakukan secara konsisten dan memadai pada neraca kantor/satker, disajikan secara bertahap pada kantor/satker yang telah siap sesuai kondisi piutang dan kualitasnya di lapangan. Hal ini karena PMK 201/PMK.06/2011 dan peraturan turunannya yaitu Perdirjen Perbendaharaan Nomor 82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga belum semua disosialisasikan Kementerian Perhubungan kepada kantor/satker.

Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih didasarkan atas kualitas piutang yaitu piutang lancar sebesar 5%, piutang tidak lancar 10%, piutang diragukan sebesar 50% dan piutang macet sebesar 100%. Untuk piutang yang telah diserahkan ke DJKN tidak dibentuk penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100% (macet) karena telah direklasifikasi ke asset lain-lain.

Tabel 22.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak per Eselon I

Kode	Eselon I	Kualitas Piutang				Saldo Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
01	Sekretaris Jenderal	945.636	41.804.421			42.750.057
04	Ditjen Perhubungan Laut	18.562.911.312	101.050.549.999		17.859.980.055	137.473.441.366
05	Ditjen Perhubungan Udara	8.495.245.013	72.647.747		213.231.940	8.781.124.700
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	9.600.000	3.080.000	7.435.000	5.340.000	25.455.000
	Total Piutang	27.068.701.961	101.168.082.167	7.435.000	18.078.551.995	146.322.771.123
	% Penyisihan	5%	10%	50%	100%	
	Total Penyisihan	208.823.521	10.116.808.217	3.717.500	18.078.551.995	

C.1.9 Piutang Bukan Pajak (*Netto*)

Piutang Bukan Pajak (netto)
Rp 117.91 miliar

Jumlah Piutang Bukan Pajak Netto per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) sebesar Rp 117.914.869.891,- dan Rp 186.791.405.223,-.

Tabel 23.

Piutang Bukan Pajak (*Netto*) per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-12	31-Des-11	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretariat Jenderal	38.564.888	35.923.457,00	2.641.431
03	Ditjen Perhubungan Darat	-	5.974.061	(5.974.061)
04	Ditjen Perhubungan Laut	109.342.111.743	162.022.803.443	(52.680.691.700)
05	Ditjen Perhubungan Udara	8.518.151.760	8.416.348.024	101.803.736
08	Ditjen Perkeretaapian	-	16.088.586.238	(16.088.586.238)
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	16.041.500	221.770.000	(205.728.500)
	Total	117.914.869.891	186.791.405.223	(68.876.535.332)

C.1.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

BL Tagihan TP/TGR
Rp287.90 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 287.903.313.703,- dan Rp 46.170.400,- yang merupakan tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TGR) yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Saldo per 31 Desember 2011	46.170.400,00
Mutasi tambah:	287.896.313.703,00
- Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar (UPP Pomako)	24.000.000,00
- TP dari UPP Saumlaki Maluku	26.900.000,00
- TP dari Bendahara Penerimaan Bandar Udara Binaka	12.000.000,00
- Indikasi Kerugian Negara yang sudah diterbitkan SKTJM	287.833.413.703,00
Mutasi kurang:	(39.170.400,00)
- Pembayaran Cicilan UPP Pomako	(21.000.000,00)
- Pembayaran Cicilan UPP Amamapare	(18.170.400,00)
Saldo per 31 Desember 2012	Rp287.903.313.703,00

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mutasi tambah sebesar Rp 62.900.000,00 merupakan Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar dari UPP Pomako Provinsi Irian Jaya, TP dari UPP Saumlaki Provinsi Maluku dan TP dari Bendahara Penerimaan Bandar Udara Binaka yang akan diselesaikan pada tahun 2013.

- 2) Mutasi tambah sebesar Rp 287.833.413.703,- merupakan koreksi atas temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara atas terjadinya pemahalan harga, kekurangan volume dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang sudah diterbitkan SKTJM-nya. Secara rinci dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

Ditjen Perhubungan Darat

Pada Ditjen Perhubungan Darat terdapat pada satker Pengembangan LLASDP Sumatera Utara sebesar Rp 1.663.059.262,- yang terdiri dari pemahalan harga sebesar Rp 1.519.126.195,- dan kurang volume pekerjaan sebesar Rp 143.933.067,-

Ditjen Perhubungan Laut

Pada Ditjen Perhubungan Laut terdapat tuntutan ganti rugi sebesar Rp 280.924.871.973,- terdiri atas pemahalan harga sebesar Rp 209.287.732.208,-, kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 61.526.234.086,- dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebesar Rp10.110.905.679,-.

SATKER	NILAI
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAMPEA	1.271.033.856,00
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TELAGA BIRU	1.291.525.155,00
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LARANTUKA	1.347.401.588,00
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNG TIRAM	1.407.906.700,00
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAPUDI	1.424.548.926,00
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PANGKALAN DODEK	1.686.215.897,00
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PALOPO	3.131.535.273,00
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WAIKELO	3.651.282.613,00
ADMINISTRATOR PELABUHAN GUNUNG SITOLI	3.844.717.592,00
ADMINISTRATOR PELABUHAN TENAU KUPANG	4.004.637.925,00
DISTRIK NAVIGASI KUPANG	4.008.840.625,00
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JANEPONTO	4.427.300.256,00
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BAJOE	5.489.186.528,00
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KALBUT	5.559.684.295,00
PENGEMBANGAN FASPEL LAUT REO/WAYWOLE - NTT	5.605.153.150,00
ADMINISTRATOR PELABUHAN MENENG/TANJUNG WANGI	6.909.940.179,00
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN REO	7.536.721.500,00
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LABUAN BAJO	8.072.940.881,00

SATKER	NILAI
ADMINISTRATOR PELABUHAN KALABAHI	8.788.340.660,00
ADMINISTRATOR PELABUHAN PANARUKAN	10.053.960.591,00
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN AWARANGE/BARRU	10.389.072.732,00
ADMINISTRATOR PELABUHAN PARE-PARE	10.541.552.004,00
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MALILI	11.189.987.171,00
ADMINISTRATOR PELABUHAN ENDE	12.451.027.853,00
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BA' A	12.654.554.329,00
ADMINISTRATOR PELABUHAN PROBOLINGGO	19.818.595.318,00
PEMBANGUNAN FASPEL LAUT GARONGKONG - SULSEL	23.804.924.859,00
DISTRIK NAVIGASI SURABAYA	24.663.623.940,00
ADMINISTRATOR PELABUHAN WAINGAPU	27.212.278.850,00
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BRANTA	38.686.380.727,00
TOTAL	280.924.871.973,00

Ditjen Perhubungan Udara

Pada Ditjen Perhubungan Udara terjadi pemahalan harga dan kurang volume pekerjaan sebesar Rp 2.121.519.183,- yang terdiri dari :

SATKER	PEMAHALAN	KURANG VOLUME	JUMLAH KN
DIREKTORAT BANDAR UDARA	834.841.975,-	217.250.157,-	1.052.092.132,-
BALAI KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN	1.069.427.051,-		1.069.427.051,-
TOTAL			2.121.519.183,-

Ditjen Perkeretaapian

Pada Ditjen Perkeretaapian terdapat pada satker Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Utara sebesar Rp 3.123.963.285,- yang terdiri dari pemahalan harga sebesar Rp 1.398.275.716,- dan kurang volume pekerjaan sebesar Rp 1.725.687.569,-.

- 3) Mutasi pengurangan sebesar Rp 39.170.400,00 merupakan pembayaran cicilan dari UPP Pomako dan UPP Amamapare.

C.1.11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar minus Rp 215.000,- dan

*Penyisihan
piutang tak
tertagih –BL TP
TGR minus
Rp.215.000*

sebesar Rp 230.852,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel 24.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BL TP/TGR per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-12	31-Des-11	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	(155.000)	(230.852)	75.852
05	Ditjen Perhubungan Udara	(60.000)		(60.000)
	Total	(215.000)	(230.852)	15.852

C.1.12 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (*Netto*)

BL TP/TGR

Rp287.90 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (*Netto*) per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 287.903.098.703,- dan Rp 45.939.548,-

Tabel 25.

Bagian Lancar TP/TGR (*Netto*) per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-12	31-Des-11	Kenaikan / (penurunan)
03	Ditjen Perhubungan Darat	1.663.059.262		1.663.059.262
04	Ditjen Perhubungan Laut	280.982.616.973	45.939.548	280.936.677.425
05	Ditjen Perhubungan udara	2.133.459.183		2.133.459.183
08	Ditjen Perkeretaapian	3.123.963.285		3.123.963.285
	Total	287.903.098.703	45.939.548	287.857.159.155

C.1.13 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Piutang Kegiatan

Operasional BLU

Rp.1,617 miliar

Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 1.617.931.020,- dan Rp 409.502.500,- yang terdapat pada Eselon I Badan Pengembangan SDM Perhubungan atas 3 (tiga) satker BLU yaitu:

Tabel 26.

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker BLU

No.	Uraian Satker	Jumlah Debitur	Jumlah
1	BP2IP Surabaya	1	Rp 21.950.000
2	STIP JAKARTA	72	Rp 471.197.500
3	ATKP Surabaya	131	Rp 1.124.783.520
	JUMLAH	204	Rp 1.617.931.020

Sedangkan mutasi Piutang dari Kegiatan Operasional BLU tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2011	Rp 409.502.500
Mutasi tambah:	
- Piutang pendapatan Jasa Pendidikan BLU	Rp 1.617.931.020
Mutasi kurang:	
- Pelunasan Tahun 2012	Rp (409.502.500)
Saldo per 31 Desember 2012	Rp 1.617.931.020

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah sebesar Rp. 1.617.931.020,- merupakan Piutang Kerjasama pendidikan dan pelatihan pada Satker STIP yang berasal dari piutang kerjasama diklat pelaut ANT I- ATT I, Pelaut ANT II-ATT II, diklat refreshing pelaut ANT II-ATT II, dan Diklat pelaut ANT III-ATT III sebesar Rp. 471.197.500,-, pada Satker BP2IP Surabaya yang merupakan pendapatan jasa pendidikan BLU sebesar Rp. 21.950.000,- dan Pada Satker ATKP Surabaya sebesar Rp. 1.124.783.520,-
- Mutasi pengurangan berupa pelunasan Piutang Kerjasama pendidikan dan pelatihan pada Satker STIP sebesar Rp 409.502.500,-

C.1.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang dari
Kegiatan
Operasional BLU
sebesar
Rp47.951.843*

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar minus Rp 47.951.843,- dan Rp 41.909.700,-. Yang terdapat pada BP2IP Surabaya, STIP Jakarta, dan ATKP Surabaya.

Tabel 27.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan Operasional BLU

Kode	Satker BLU	Kualitas Piutang				Saldo Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	BP2IP Surabaya	21.950.000	0			21.950.000
2	STIP Jakarta	431.135.000			40.062.500	471.197.500
3	ATKP Surabaya	1.124.783.520				1.124.783.520
	Total	1.577.868.520	0	0	40.062.500	1.617.931.020
	% Penyisihan	5%	10%	50%	100%	
	Nilai Penyisihan	7.889.343	0	0	40.062.500	47.951.843

C.1.15 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (*Netto*)

Piutang Kegiatan Operasional BLU (netto) Rp.1,569 miliar

Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (*Netto*) pada Badan Pengembangan SDM *Perhubungan* per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 1.569.979.177,- dan Rp 367.592.800,- yang terdapat pada 3 (tiga) satker BLU yaitu: .

Tabel 28.
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (*Netto*)

Kode	Eselon I	31-Des-12
1	BP2IP Surabaya	21.840.250
2	STIP Jakarta	428.979.325
3	ATKP Surabaya	1.119.159.602
	Total	1.569.979.177

C.1.16 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU Rp.42.357.400

Jumlah Piutang dari *Kegiatan* Non Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 42.357.400,- dan sebesar Rp 62.895.200,- yang terdapat pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran berupa piutang sewa ruangan untuk kantin dan rumah dinas.

Saldo per 31 Desember 2011	Rp62.895.200,00
Mutasi tambah:	
- Piutang pendapatan Jasa lain	Rp42.357.400,00
Mutasi kurang:	
- Pelunasan Tahun 2012	(Rp62.895.200,00)
Saldo per 31 Desember 2012	Rp42.357.400,00

C.1.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Rp 211.787)

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar minus Rp 211.787,- dan Rp 314.476,- Yang terdapat pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yaitu sebesar 0,5% dari total Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU dengan kualitas lancar.

C.1.18 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (*Netto*)

*Piutang Kegiatan
Non Operasional
BLU (netto)
Rp.42.145 juta*

Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (*Netto*) pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 42.145.613,- dan Rp 62.580.724,- merupakan piutang dari kegiatan non operasional BLU setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 5%.

C.1.19 Persediaan

*Persediaan
Rp 156.09
miliar*

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 156.094.840.054,- dan sebesar Rp. 750.419.837.513,-. Nilai Persediaan tersebut sudah termasuk Persediaan Badan Layanan Umum sebesar Rp 1.305.581.206,- yang terdapat pada 7 (tujuh) satker Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tabel 29.

Rincian Persediaan per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-12	31-Des-11	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	456.700.327	842.210.116	(385.509.789)
02	Inspektorat Jenderal	21.267.650	12.684.025	8.583.625
03	Ditjen Perhubungan Darat	7.673.163.505	645.357.066.865	(637.683.903.360)
04	Ditjen Perhubungan Laut	81.191.331.537	55.143.865.450	26.047.466.087
05	Ditjen Perhubungan Udara	61.516.337.654	43.717.119.655	17.799.217.999
08	Ditjen Perkeretaapian	2.945.638.900	2.947.952.550	(2.313.650)
11	Badan Litbang Perhubungan	11.978.975	8.775.861	3.203.114
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	2.278.421.506	2.390.162.991	(111.741.485)
	Total	156.094.840.054	750.419.837.513	(594.324.997.459)

Nilai persediaan yang disajikan pada neraca per eselon I merupakan nilai berdasarkan hasil laporan keuangan masing-masing eselon I yang sudah dilakukan *stock opname*.

Tabel 30.

Rincian Persediaan masing-masing satker Badan Layanan Umum

BLU	31-Des-12	31-Des-11	Kenaikan / (penurunan)
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	112.568.775	201.557.050	(88.988.275)
BP 3IP	820.563.348	785.136.258	35.427.090
Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar	252.783.646	120.599.495	132.184.151
ATKP Surabaya	621.750	678.930	(57.180)
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	32.767.087		32.767.087
BP 2TD Tegal	4.600	-	4.600
Balai Diklat Ilmu Pelayaran Surabaya	86.272.000	62.236.950	24.035.050
Total	1.305.581.206	1.170.208.683	135.372.523

Nilai persediaan Badan Layanan Umum yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Laporan Keuangan masing-masing Badan Layanan Umum yang sudah dilakukan *stock opname*.

Tabel 31.

Daftar Persediaan per 31 Desember 2012

Uraian	31-Des-12	31-Des-11	Kenaikan/(Penurunan)
Barang Konsumsi	34.718.111.463	34.085.665.811	632.445.652
Amunisi	70.226.324	71.501.324	(1.275.000)
Bahan Untuk Pemeliharaan	2.193.974.008	1.781.462.846	412.511.162
Suku Cadang	82.693.982.383	43.034.036.133	39.659.946.250
Persediaan Untuk di Jual /diserahkan Kepada	5.243.837.360	599.439.651.531	(594.195.814.171)
Pita Cukai, Materai dan Leges	2.549.000	456.000	2.093.000
Bahan Baku	13.178.820.752	40.168.137.082	(26.989.316.330)
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	106.320.680	99.257.450	7.063.230
Persediaan lainnya	17.887.018.084	31.739.669.336	(13.852.651.252)
Jumlah	156.094.840.054	750.419.837.513	(594.324.997.459)

C.2 ASET TETAP

*Aset Tetap
Rp 158,62
triliun.*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 158.623.798.919.876,- dan sebesar Rp 135.489.192.929.555,-.

Tabel 32.
Posisi Aset Tetap

No.	Uraian	31-Dec-12	31-Dec-11	Kenaikan / (penurunan)
1	Tanah	51.452.192.910.982	50.522.076.113.982	930.116.797.000
2	Peralatan dan Mesin	17.639.315.923.994	13.988.322.892.427	3.650.993.031.567
3	Gedung dan Bangunan	9.144.899.884.998	6.777.229.917.115	2.367.669.967.883
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.771.420.087.774	47.984.747.039.184	4.786.673.048.590
5	Aset Tetap Lainnya	2.446.296.249.529	2.303.166.929.758	143.129.319.771
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.169.673.862.599	13.913.650.037.089	11.256.023.825.510
	Jumlah	158.623.798.919.876	135.489.192.929.555	23.134.605.990.321

Posisi Aset Tetap tersebut sudah termasuk Aset Tetap yang ada pada 7 (tujuh) satker Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 3.437.390.321.536,- pada 31 Desember 2012 dan sebesar Rp 3.168.478.027.655,- pada 31 Desember 2011.

Tabel 33.
Posisi Aset Tetap Badan Layanan Umum

No.	Uraian	31-Dec-12	31-Dec-11	Kenaikan / (penurunan)
1	Tanah	1.250.491.053.251	1.223.489.280.480	27.001.772.771
2	Peralatan dan Mesin	750.047.580.208	643.140.909.230	106.906.670.978
3	Gedung dan Bangunan	1.325.147.647.960	1.199.196.156.350	125.951.491.610
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.434.655.576	38.866.982.003	3.567.673.573
5	Aset Tetap Lainnya	13.053.107.171	11.326.948.158	1.726.159.013
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	56.216.277.370	52.457.751.434	3.758.525.936
	Jumlah	3.437.390.321.536	3.168.478.027.655	268.912.293.881

Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 34.
Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2012

No.	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca	Aset Tetap dalam SIMAK BMN	Selisih
1	Tanah	51.452.192.910.982	51.452.192.910.982	0
2	Peralatan dan Mesin	17.639.315.923.994	17.639.315.923.994	0
3	Gedung dan Bangunan	9.144.899.884.998	9.144.899.884.998	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.771.420.087.774	52.771.420.087.774	0
5	Aset Tetap Lainnya	2.446.296.249.529	2.446.296.249.529	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.169.673.862.599	25.169.673.862.599	0
	Jumlah	Rp 158.623.798.919.876	Rp 158.623.798.919.876	Rp -

Tidak Terdapat perbedaan posisi Aset Tetap per 31 Desember 2012 dengan SIMAK – BMN.

C.2.1 Tanah

Tanah

Rp. 51,45 triliun

Nilai tanah per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 51.452.192.910.982,- dan Rp 50.522.076.113.982,-. Nilai ini sudah termasuk nilai Tanah yang ada pada satker Badan Layanan Umum yang ada pada di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 1.250.491.053.251,-. Mutasi Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 35.
Rincian Mutasi Tanah

Saldo per 31 Desember 2011	50.522.076.113.982
Mutasi tambah :	
Pembelian	46.333.989.796
Transfer Masuk	33.624.186.770
Hibah Masuk	4.169.250.000
Rampasan / sitaan	36.934.432.016
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	176.100.967.603
Pembatalan Penghapusan	5.247.000
Reklasifikasi Masuk	39.500.601.525
Bangun Serah Guna	
Bangun Guna Serah	
Pertukaran	
Perolehan Lainnya	3.062.920.177
Pengembangan Nilai Aset	6.249.998.394
Penyelesaian Pembangunan Langsung	172.994.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	240.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Akuntansi	755.610.207
Penerimaan Aset dari Pengembangan Asset Renovasi	
Pengembangan melalui KDP	130.965.381.992
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	549.469.140.143
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	-9.805.050.000
Transfer Keluar	-21.143.202.282
Hibah (Keluar)	0
Pengurangan	0
Reklasifikasi Keluar	-51.511.743.121
Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas	0
Koreksi Pencatatan	-14.538.507.492
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset	0
Penghentian BMN dari Penggunaan	-229.659.728
Saldo per 31 Desember 2012	51.452.192.910.982

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan

Mesin

Rp 17,639 triliun

Nilai Peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 17.639.315.923.994,- dan Rp 13.988.322.892.427,-. Nilai ini sudah termasuk nilai Peralatan dan Mesin yang ada pada satker Badan Layanan umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 750.047.580.208,-.

Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 36.
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desember 2011	13.988.322.892.427
Mutasi tambah :	
Penambahan Saldo Awal	4.688.289.904.467
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	3.360.336.318.271
Pembatalan Penghapusan	154.557.500
Reklasifikasi Masuk	2.805.457.788.215
Perolehan Lainnya	24.030.293.600
Penyelesaian Pembangunan Langsung	148.978.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	3.217.349.135
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks	128.424.610
Pengembangan Nilai Aset	148.588.021.255
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	14.267.022.429
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	35.012.826.699
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	218.375.624
Pengembangan Melalui KDP	127.817.046.050
Mutasi kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-10.207.229.675
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-71.501.502.267
Penghapusan	-4.468.565.728
Transfer Keluar	-619.609.777.823
Hibah (Keluar)	-15.338.548.300
Reklasifikasi Keluar	-2.099.110.770.783
Koreksi Pencatatan	-22.998.101.893
Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	-3.828.646.947.087
Penghapusan semu karena reklasifikasi dar	-122.522.085
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-884.669.908.647
Saldo per 31 Desember 2012	17.639.315.923.994

C.2.3 Gedung dan Bangunan

*Gedung &
Bangunan
Rp.9.145 triliun*

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (Audited) adalah sebesar Rp 9.144.899.844.998,- dan sebesar Rp 6.777.229.917.115,-. Nilai Gedung dan Bangunan ini sudah termasuk nilai Gedung dan Bangunan yang ada pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kemenhub sebesar Rp.1.325.147.647.960-.

Mutasi Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 37.
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo per 31 Desember 2011	6.777.229.917.115
Mutasi tambah :	
Penambahan saldo awal	7.124.328.854
Pembelian	111.951.515.960
Transfer Masuk	116.546.561.640
Hibah (Masuk)	5.813.881.240
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.551.245.816.695
Pembatalan Penghapusan	37.000.000
Reklasifikasi Masuk	356.896.428.416
Perolehan Lainnya	690.818.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	2.342.471.050
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2.426.118.699
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks	14.528.407.406
Pengembangan Nilai Aset	23.413.866.245
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	39.403.810.863
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	491.526.228.058
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	5.089.980.284
Pengembangan Melalui KDP	203.074.148.726
Mutasi kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-21.100.733.860
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-18.671.488.445
Penghapusan	-52.635.725.000
Transfer Keluar	-58.090.657.334
Reklasifikasi Keluar	-174.028.052.673
Koreksi Pencatatan	-29.412.383.895
Penghapusan semu karena reklasifikasi dar	-1.554.882.405
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-194.820.439.650
Koreksi nilai (sudah terbit SKTJM)	-14.127.050.991
Saldo per 31 Desember 2012	9.144.899.844.998

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan Irigasi dan
Jaringan
Rp52,77 triliun*

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 52.771.420.087.774,- dan Rp 47.984.747.039.184,-. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan ini sudah termasuk nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ada pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 42.434.655.576,-.

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 38.

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2011	47.984.747.039.184
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	1.438.234.822.226
Hibah (Masuk)	106.362.158.325
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	241.708.000
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	1.182.389.056.937
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	178.968.026.820
Pembatalan Penghapusan	1.954.551.300
Pembelian	6.789.002.060
Penambahan Saldo Awal	2.366.529.135.427
Pengembangan Melalui KDP	1.088.386.842.032
Pengembangan Nilai Aset	46.756.331.344
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4.955.293.416.495
Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.433.406.400
Perolehan Lainnya	3.327.606.000
Transfer Masuk	278.256.358.156
Mutasi kurang :	
Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	-2.646.821.912.907
Reklasifikasi Keluar	-726.093.619.133
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-128.232.573.191
Hibah (Keluar)	-84.626.659.120
Transfer Keluar	-573.572.936.200
Penghapusan	-139.228.666
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-1.034.363.442.246
Koreksi Pencatatan	-1.508.382.427.282
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-105.616.419.690
Koreksi nilai (sudah terbit SKTJM)	-60.400.154.497
Saldo per 31 Desember 2012	52.771.420.087.774

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp2,446 triliun*

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 2.446.296.249.529,- dan sebesar

Rp 2.303.166.929.758, yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai Aset Tetap Lainnya ini sudah termasuk nilai Aset Tetap Lainnya pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan Rp 13.053.107.171,-

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebesar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 39.
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2011	2.303.166.929.758
Mutasi Tambah :	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	191.632.100
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	90.789.774.295
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	33.596.544
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	191.979.000
Pembelian	30.905.938.498
Penambahan Saldo Awal	3.583.631.599
Pengembangan Melalui KDP	52.771.955.000
Pengembangan Nilai Aset	104.024.611.318
Reklasifikasi Masuk	49.690.288.508
Transfer Masuk	2.039.888.704
Penghapusan	(1.250.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(14.511.250)
Mutasi kurang :	
Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	(2.598.000.600)
Reklasifikasi Keluar	(94.918.567.427)
Transfer Keluar	(12.401.716.504)
Hibah (Keluar)	(2.598.000.600)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	(84.471.045)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(3.619.050.437)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(233.736.400)
Koreksi Pencatatan	(73.572.579.400)
Koreksi nilai (sudah terbit SKTJM)	(1.052.092.132)
Saldo per 31 Desember 2012	2.446.296.249.529

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan
Rp25,169 triliun*

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 25.169.673.862.598,- dan Rp 13.913.650.037.089,-. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini sudah termasuk Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan Rp 56.216.277.370,-.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 40.
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP	31-Des-11	Penambahan	KDP Yang Menjadi Aset Definitif	31-Des-12
Tanah Dalam Pengerjaan	299.793.738.953	959.008.555.296	449.011.286.087	809.791.008.162
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	2.890.380.947.672	3.692.471.464.916	3.236.139.927.201	3.346.712.485.387
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	3.351.593.432.949	2.639.120.251.030	1.824.064.759.470	4.166.648.924.509
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	7.251.380.622.075	15.570.569.470.149	5.853.594.363.035	16.968.355.729.189
Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	120.501.295.440	223.010.003.893	253.091.467.898	90.419.831.435
Sub Total	13.913.650.037.089	23.084.179.745.284	11.615.901.803.691	25.381.927.978.682
Koreksi nilai (sudah terbit SKTJM)				-212.254.116.083
Total				25.169.673.862.599

Selain itu, terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa tanah Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada satker Pembangunan *Double-Double Track* senilai Rp. 21.726.090.000,- tidak diketahui keberadaan dan tidak didukung bukti kepemilikan. Ditjen Perkeretaapian sesuai rekomendasi BPK RI telah membentuk Tim untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengadaan tanah senilai Rp. 21.726.090.000,- yang tidak jelas keberadaannya dengan Surat Keputusan Dirjen Perkeretaapian No. KP. 801./SK.52/DJKA/06/11 tanggal 24 Juni 2011. Inspektorat Jenderal dengan surat PS.313/1/4/ITJEN-2012 tanggal 11 Januari 2012 telah melakukan penelusuran dan investigasi dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua BPK-RI perihal Hasil Audit Khusus Penelitian Keaslian dan Keabsahan Dokumen Pengadaan Tanah 2006 Satker Pembangunan *Double-Double Track*, saat ini permasalahan tersebut masih ditangani KPK.

C.3 PIUTANG JANGKA PANJANG

C.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

*TP/TGR sebesar
Rp 479.001.363*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 479.001.363,- dan Rp 423.135.811,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Tabel 41.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-12	31-Des-11	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	363.749.406	423.135.811	(59.386.405)
05	Ditjen Perhubungan Udara	115.251.957	-	115.251.957
	Total	479.001.363	423.135.811	55.865.552

Mutasi Tagihan Perbendaharaan/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2011	Rp423.135.811,00
Mutasi tambah:	
- TP/TGR Bendahara Penerimaan Bandara Binaka Medan	Rp115.251.957,00
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar TP/TGR	(Rp59.386.405,00)
Saldo per 31 Desember 2012	Rp479.001.363,00

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tuntutan Perbendaharaan Bendahara Penerimaan Bandara Binaka Medan tahun 2012.
- Mutasi pengurangan sebesar Rp 59.386.405,00 merupakan reklasifikasi TGR menjadi Bagian Lancar TGR.

C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sebesar minus Rp 1.653.998 minus Rp 1.312.745, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Tabel 42.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-12	31-Des-11	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	(1.077.738)	(1.312.745)	235.007
05	Ditjen Perhubungan Udara	(576.260)	-	(576.260)
	Total	(1.653.998)	(1.312.745)	(341.253)

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih TP/TGR
(Rp1.653.998)

Tagihan TP/TGR
Netto
Rp477.347.365

C.3.3 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (*Netto*)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 477.347.365,- dan Rp 421.823.066,-.

Tabel 43.

Tagihan Tuntutan TP/TGR per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-12	31-Des-11	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	362.671.668	421.823.066	(59.151.398)
05	Ditjen Perhubungan Udara	114.675.697		114.675.697
	Total	477.347.365	421.823.066	55.524.299

C.4 ASET LAINNYA

Aset Lainnya
Rp 4,071 triliun

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 4.071.774.581.032,- dan sebesar Rp. 2.687.295.869.475,-. Nilai Aset Lainnya ini sudah termasuk Nilai Aset Lainnya pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 43.036.129.293,- yang terdapat pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Tabel 44.

Rincian Aset Lainnya

Aset Lainnya	31-Des-12	31-Des-11	Kenaikan / (penurunan)
Aset Tak Berwujud	1.928.568.236.690	1.489.684.023.758	438.884.212.932
Aset Lain-lain	2.143.206.344.342	1.197.611.845.717	945.594.498.625
Total	4.071.774.581.032	2.687.295.869.475	1.384.478.711.557

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud
Rp.1,928 triliun

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 1.928.568.236.690,- dan sebesar Rp 1.489.684.023.758,-. Nilai aset tak berwujud tersebut sudah termasuk Aset Tak Berwujud pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 42.026.303.393,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel 45.

Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-12
01	Sekretaris Jenderal	137.340.257.383
02	Inspektorat Jenderal	2.663.813.100
03	Ditjen Perhubungan Darat	372.284.176.047
04	Ditjen Perhubungan Laut	114.253.660.228
05	Ditjen Perhubungan Udara	165.928.418.749
08	Ditjen Perkeretaapian	659.961.011.822
11	Badan Litbang Perhubungan	306.299.845.188
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	169.837.054.173
	Total	1.928.568.236.690

Tabel 46.

Rincian Aset Tak Berwujud Menurut Jenisnya

No	Uraian	Rupiah
1	Hak Cipta	181.447.000
1	Paten	23.167.000
2	Software	159.771.576.208
3	Lisensi	7.712.688.364
4	Hasil Kajian/Penelitian	478.286.238.975
5	Aset Tak Berwujud Lainnya	1.282.593.119.143
	Total	1.928.568.236.690

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2011	1.489.684.023.758
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	102.277.860.072
Transfer Masuk	79.349.715.332
Hibah (Masuk)	106.232.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	32.087.650
Pembelian	161.265.307.500
Penambahan Saldo Awal	1.375.569.890
Pengembangan Melalui KDP	133.516.900
Pengembangan Nilai Aset	87.155.651.501
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	173.734.827.805
Perolehan Lainnya	3.870.972.500
Mutasi kurang :	
Reklasifikasi Keluar	-46.237.325.658
Transfer Keluar	-37.574.399.856
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-13.958.659.031
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-158.400.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-15.955.470.673
Koreksi Pencatatan	-56.533.273.000
Saldo per 31 Desember 2012	1.928.568.236.690

C.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain
Rp2,143 triliun

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 2.143.206.344.342,- dan sebesar Rp 1.197.611.845.717,- yang merupakan barang milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Perhubungan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Nilai Aset Lain-lain tersebut sudah termasuk Aset Lain-lain pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 1.009.825.900,-.

Mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2011	1.197.611.845.717
Mutasi Tambah :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lai Total	1.094.429.685.152
Mutasi kurang :	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihenti To	-5.843.382.640
Penghapusan (BMN yang dihentikan) Total	-142.408.720.156
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) Total	-583.083.731
Saldo per 31 Desember 2012	2.143.206.344.342

Aset Lain-Lain ini adalah hasil reklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan/dihentikan penggunaannya, diharapkan dalam waktu dekat akan diajukan penghapusannya kepada pengelola barang.

Tidak terdapat selisih nilai Aset Lain-Lain pada Neraca dengan SIMAK-BMN.

KEWAJIBAN

C.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp 103,357 miliar

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 103.357.423.491, dan Rp 131.518.928.284,- merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Eselon I	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Utang kepada pihak ketiga lainnya
Sekretariat Jenderal	4.872.969	13.883	0
Ditjen Perhubungan Darat	4.873.258	20.453.874	221.459.350
Ditjen Perhubungan Laut			22.807.506.927
Ditjen Perhubungan Udara	234.301.674	394.223.312	
Ditjen Perkeretaapian			76.910.736.194
Badan Litbang Perhubungan	623.495.286		
Badan PSDM Perhubungan	597.255.754	519.376.094	1.018.854.916
Total	1.464.798.941	934.067.163	100.958.557.387

Terdapat Koreksi BPK-RI pada Satker Peningkatan Fungsi Pelabuhan dan Pengerukan Pusat pada Laporan Keuangan TA. 2011 yaitu :

- Eskalasi harga pekerjaan Pelabuhan Dumai Tahap III (proyek selesai tahun 2008) sesuai hasil audit BPKP Rp. 93.141.284.843,18 ditambah PPN 10% Rp. 9.314.128.484,32 sehingga menjadi Rp. 102.455.413.328,-.
- Kekurangan pembayaran hutang retensi kepada Kontraktor pekerjaan Pelabuhan Dumai Tahap III yaitu "Rinkai Adhi Marubeni (JV)" sebesar Rp. 445.329.478,-.
- Kekurangan pembayaran pelunasan kontrak senilai ¥18,428,740.00 (Kurs ¥100=Rp11.028,53; Kurs Tengah Transaksi BI per 31 Des 2011) kepada konsultan Pelabuhan Dumai Tahap III yaitu "*Pacific Consultant*" dalam rupiah sebesar Rp. 2.032.419.120,-.

Dari ketiga temuan tersebut telah dicatat sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 104.933.161.926,- pada TA. 2011 dan pada Tahunan TA. 2011 telah dilakukan realisasi pembayaran utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 56.657.748.598,- sehingga Satker Peningkatan Fungsi Pelabuhan dan Pengerukan Pusat masih mempunyai kewajiban Utang pada Pihak Ketiga sebesar Rp. 48.275.413.328,-. Realisasi pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga telah dianggarkan di Tahun Anggaran 2011 Pada MAK 534111 (Belanja Modal Jalan dan Jembatan) dan telah mendapat Revisi pengesahan untuk pencairannya dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Pengesahan Nomor S-4173/PB/2011 Tanggal 27 April 2011, sehingga dengan adanya realisasi Belanja Modal tersebut tidak menambah nilai aset pada Satker Peningkatan Fungsi Pelabuhan dan Pengerukan Pusat.

Pada Ditjen Perkeretaapian terdapat Utang Kepada Pihak Ketiga senilai Rp 76.884.009.850,00 yang merupakan utang dari Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Barat kepada Penyedia Barang dan Jasa atas pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian di Propinsi Jawa Barat pada TA 2011. Hal ini timbul karena adanya penolakan atas dokumen pendukung pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran sisa nilai kontrak oleh KPPN Bandung, sehingga anggaran senilai Rp 76.884.009.850,00 tidak dapat terealisasi.

C.5.2 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0*

Nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 116.103.388,- perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Penerimaan.

C.5.3 Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp19,80 miliar*

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 19.802.839.526,- dan Rp 19.480.696.134,- merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

C.5.4 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN
Rp810.754.169*

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 810.754.169,- dan Rp 473.989.973,- merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

C.5.5 Pendapatan Yang Ditangguhkan

*Pendapatan yang
Ditangguhkan
Rp 19,102
miliar*

Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah Rp 19.102.564.776,- dan Rp 10.044.906.720,- merupakan PNBPN yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Di Bendahara Penerimaan dan Akun Kas Lainnya dan Setara Kas.

EKUITAS

C.6 EKUITAS DANA LANCAR

C.6.1 Cadangan Piutang

*Cadangan
Piutang
Rp 407.43
miliar*

Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah (*Audited*) sebesar Rp 407.430.093.384,- dan Rp 187.267.518.295,-. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, dan Uang Muka Belanja dan merupakan nilai netto setelah dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

C.6.2 Cadangan Persediaan

*Cadangan
Persediaan
Rp 156,09 miliar*

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 156.094.840.054,- dan Rp 750.419.837.513,- merupakan ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Persediaan dan Persediaan Badan Layanan Umum.

C.6.3 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

*Dana yang harus
Disediakan untuk
Pembayaran
Utang Jangka
Pendek
Rp 103,181
miliar*

Nilai Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar minus Rp 103.181.868.640,- dan minus Rp 131.633.900.472,- merupakan bagian dari ekuitas yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan.

C.6.4 Dana Lancar BLU

*Dana Lancar BLU
Rp 161.040
miliar*

Nilai Dana Lancar BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 161.040.871.577,- dan Rp 132.850.346.828,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar pada Badan Layanan Umum yang terdapat pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Kas Pada BLU.

C.6.5 Ekuitas Dana Lancar Lainnya

*Ekuitas Dana
Lancar Lainnya
Rp 3,080 miliar*

Nilai Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 3.080.936.942,- dan sebesar Rp 1.851.845.922,-. Merupakan penyeimbang dari Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari saldo hibah langsung.

Saldo hibah langsung Rp 3.080.936.942,- terdapat pada Ditjen Perhubungan Laut atau sebesar 318,607.75 USD (kurs Rp 9.670,-) yaitu pada satker Pengembangan Kenavigasian yang terdiri dari :

- Rekening Giro Penampungan ANF Bank BNI Cabang Harmoni Nomor Rekening 0165113802 sebesar USD 234.611,02.
- Rekening Giro Penampungan NORAD Bank BNI Cabang Harmoni Nomor Rekening 220214025 sebesar USD 83.996,73.

C.6.6 Barang/Jasa Yang Harus Diterima

*Barang/Jasa
Yang Harus
Diterima
Rp 19.995 miliar*

Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diterima per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 19.995.697.553,- dan Rp 511.735.738,- merupakan ekuitas dana lancar berupabarang/jasa yang masih harus diterima dari pihak lain. Akun ini merupakan penyeimbang dari akun Belanja Dibayar Dimuka.

C.6.7 Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan

*Barang/Jasa
Yang Harus
Diserahkan
Rp 19,802 miliar*

Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan per 31 Desember 2011 dan per 31 Desember 2011 adalah sebesar minus Rp 19.802.839.526,- dan minus Rp 19.480.696.134,- Merupakan penyeimbang dari akun Pendapatan Diterima Dimuka berupa Barang/Jasa yang masih harus diserahkan kepada pihak lain.

C.7 EKUITAS DANA INVESTASI

C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

*Diinvestasikan
Dalam Aset Tetap
Rp 158,623
triliun*

Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah Rp 158.623.798.919.876,- dan Rp 135.489.192.929.555,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

*Diinvestasikan
Dalam Aset
Lainnya Rp4,071
triliun*

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 (*Audited*) adalah sebesar Rp 4.072.251.928.397,- dan Rp 2.687.717.692.541,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan BPK-RI sesuai surat nomor 110/S/III-XIV.3/12/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Satuan Kerja dilingkungan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Instansi terkait lainnya TA 2011 dan 2012 di Propinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 2.125.551.054,97 dan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp5.929.220,00 yang harus dikembalikan ke Kas Negara dengan perincian :

- a. Kelebihan pembayaran karena kekurangan volume fisik senilai Rp542.056.403,52 dan kelebihan pembayaran jasa konsultansi pada 6 (enam) kontrak konsultan pengawas sebesar Rp53.669.916,67 pada Satker Pengembangan LLAJ Jawa Barat

- b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp110.333.249,76 pada Satker Pengembangan LLAJ Banten.
- c. Kelebihan pembayaran sebesar Rp1.419.491.485,02 dan denda keterlambatan sebesar Rp5.929.220,00 pada tiga satker di Direktorat LLAJ.

Perkembangan tindak lanjutnya sampai dengan saat ini telah disetor ke kas negara sebesar Rp704.070.712,00 dengan rincian :

- a. Pada Satker Pengembangan LLAJ Jawa Barat telah disetor Rp222.052.224,00
- b. Pada Satker Pengembangan LLAJ Banten telah disetor ke kas negara sebesar Rp38.388.101,00
- c. Pada 3 (tiga) Satker dilingkungan Direktorat LLAJ telah disetor sebesar Rp443.630.387,00

D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Daftar temuan dan rekomendasi Badan pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dalam lampiran

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar Informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana lampiran.

D.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kementerian Perhubungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran.

D.5 CATATAN PENTING LAINNYA

1. Terdapat kontrak pengadaan pesawat latih nomor : 008/KONT/XII/PPKA/STPI-2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Pengadaan Pesawat Latih Jenis Sayap Tetap dan Link Simulator yang dilaksanakan oleh PT. Pasifik Putra Metropolitan. Atas kontrak tersebut, 12 (dua belas) unit pesawat latih jenis sayap tetap telah sampai di STPI Curug sejak tanggal 12 April 2013, yang diangkut oleh 6 (enam) kontainer dengan rincian sebagai berikut :

- 1) MSKU4650885

Nomor registrasi N 2448W nomor seri pesawat 2842379

Nomor registrasi N 2449S nomor seri pesawat 2842380

- 2) MSKU4690281

Nomor registrasi N 2448V nomor seri pesawat 2842378

Nomor registrasi N 24623 nomor seri pesawat 2842373

- 3) MSKU4593682

Nomor registrasi N 2447N nomor seri pesawat 2842374

Nomor registrasi N 2447X nomor seri pesawat 2842375

- 4) MSKU4620900

Nomor registrasi N 24473 nomor seri pesawat 2842371

Nomor registrasi N 24573 nomor seri pesawat 2842372

- 5) MSKU4570049

Nomor registrasi N 2448L nomor seri pesawat 2842376

Nomor registrasi N 2450H nomor seri pesawat 2842372

- 6) APMU4528397

Nomor registrasi N 2448U nomor seri pesawat 2842377

Nomor registrasi N 2450B nomor seri pesawat 2842381

Pada tanggal 13 dan 14 April 2013, 6 (enam) kontainer tersebut telah dibongkar dan 12 (dua belas) unit pesawat ditempatkan di hanggar STPI, selanjutnya pesawat tersebut akan di-*reassembly* pada tanggal 5 Juni 2013 menyesuaikan dengan jadwal pihak pabrik Piper Warrior III. Sedangkan 2 (dua) unit simulator PA28 121 Warrior saat ini sudah siap dioperasikan.

2. Pada Ditjen Perhubungan Laut terdapat temuan pemeriksaan BPK tahun 2011 berupa piutang PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelni (Persero) sebesar Rp9.261.071.618,70 dan USD102,585.09 atau Setara Rp10.191.313.214,82 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya, dengan rincian :
 - 1) Piutang Bukan Pajak PT. Pertamina (Persero) untuk Tahun 2005 dan 2006 senilai Rp1.341.415.370,70 dan USD 16.621,94 yang terakumulasi pada 13 satker;
 - 2) Piutang Bukan Pajak yang belum dapat diidentifikasi wajib bayarnya senilai Rp6.338.780.918,00 dan USD85.963,15;
 - 3) Piutang Bukan Pajak PT. Pelni (Persero) pada tahun 2005 dan 2008 senilai Rp1.580.875.330,00.

Terhadap piutang ini Kementerian Perhubungan dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut telah menindaklanjuti dengan menerbitkan invoice kepada Vice President Marine Shipping Pertamina Perkapalan PT Pertamina (Persero) sebesar Rp. 3.665.038.076 dan USD60,285.38 untuk Tahun 2005 dan Rp. 2.673.742.842 dan USD 25,677.77 untuk Tahun 2006 sesuai surat Nomor KU 207/1/16/DJPL-12 tanggal 3 Desember 2012, dan PT Pertamina telah melunasi atas invoice tersebut.

Namun atas piutang PT. Pertamina (Persero) senilai Piutang Bukan Pajak PT. Pertamina (Persero) untuk Tahun 2005 dan 2006 senilai Rp1.341.415.370,70 dan USD 16.621,94 yang terakumulasi pada 13 satker dan piutang PT. Pelni (Persero) senilai pada tahun 2005 dan 2008 senilai Rp1.580.875.330,00, Kementerian Perhubungan tidak dapat menerbitkan invoice karena terkendala data dukung. Sebagai langkah tindak lanjut Kementerian Perhubungan telah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan surat nomor KU.202/63/22 Phb 2013 tanggal 24 April 2013 perihal Piutang PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelni (Persero).

3. Terhadap utang kepada pihak ketiga pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Barat Ditjen Perkeretaapian senilai Rp76.884.009.850,00, yang belum dapat diyakini kewajarannya, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti dengan mengajukan surat permohonan verifikasi kepada BPKP dengan surat nomor KU 307/II/II/Phb/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Permohonan

Verifikasi Utang Kepada Pihak Ketiga pada Kemenhub Tahun 2011 dan nomor KU 307/I/4 Phb 2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Permohonan Verifikasi Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pembuatan Lokomotif beserta Repowering (KRL) pada Kemenhub Tahun 2011. Terhadap permohonan verifikasi Kemenhub, BPKP telah menugaskan kepada Perwakilan BPKP Jawa Barat untuk melakukan verifikasi dengan surat nomor S-240/D1.03/2013 tanggal 4 April 2013 perihal Verifikasi Utang Kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2011 dan telah membentuk tim untuk melakukan verifikasi namun hasilnya belum disampaikan kepada Kementerian Perhubungan.

4. Pada perkiraan Kas Badan Layanan Umum BP2IP Surabaya per 31 Desember 2011 terdapat saldo sebesar Rp. 11.384.123.049,- yang terdiri dari :

1. Bank BNI 46 A/C. 0042293940	Rp. 4.365.967.670,-
2. Bank BNI 46 A/C. 7997997951	Rp. 5.710.431.714,-
3. Bank Muamalat A/C. 7020273822	<u>Rp. 1.307.723.665,-</u>
Jumlah	Rp.11.384.123.049,-

Atas saldo pada Rekening Bank Muamalat A/C. 7020273822 per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 1.307.723.665,- merupakan hasil temuan pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan BP2IP Surabaya tahun 2011. Adapun penerimaan dan penggunaan dana tersebut tidak dapat dilakukan pengesahan karena penerimaan dana dan penggunaannya tidak ada di dalam dan RBA dan DIPA BP2IP. Dana pada rekening Bank Muamalat tersebut digunakan langsung oleh BP2IP Surabaya untuk keperluan operasional kantor dan kegiatan yang tidak dapat didanai dari DIPA (bukti dukung telah disampaikan kepada UAPPA-E1 dan BPK-RI).

Pada tanggal 23 Pebruari tahun 2012 rekening pada Bank Muamalat telah ditutup, rincian penerimaan dan penggunaan dana per 01 Januari s.d. 23 Pebruari 2012 adalah sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	NILAI
I.	SALDO AWAL	1.307.723.665
II.	PENERIMAAN	
	A. PENERIMAAN TAHUN 2012 1.980.000.000	
	B. BAGI HASIL TAHUN 2012 3.205.738	
	JUMLAH PENERIMAAN	1.983.205.738
III.	PENGELUARAN	
	A. BIAYA OPERASIONAL KANTOR 1.622.045.328	
	B. BIAYA PERESMIAN KAMPUS II 878.856.575	
	C. PENGASPALAN JALAN AKSES MASUK 150.000.000	
	D. BIAYA WISUDA TAHUN 2012 75.000.000	
	E. PEMBAYARAN PNJAMAN KOPERASI 330.000.000	
	F. KONTRIBUSI KE KOPERASI 10.000.000	
	G. SEMBAKO PEDULI MASYARAKAT SEKITAR 225.000.000	
	H. BIAYA LAYANAN BULAN JANUARI 7.500	
	I. BIAYA PENUTUPAN REKENING 20.000	
	JUMLAH PENGELUARAN	3.290.929.403
IV	SALDO BANK	0